



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL**

PEMBIMBING:

Drs. Suradi, M. Si

Oleh:

Azizah Nisa Azzahrah

NRP 20.03.047

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama : AZIZAH NISA AZZAHRAH
NRP : 20.03.047
Program : Program Studi Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

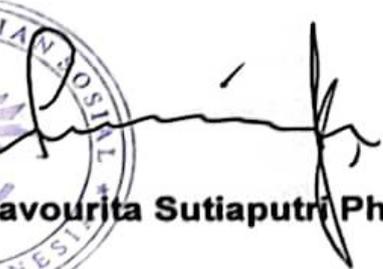
Pembimbing :



Drs. Suradi, M.Si

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,**



Lina Favourita Sutiaputri Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWt karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Praktikum 1 yang berjudul “Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial” ini dapat praktikan selesaikan tepat pada waktunya.

Keberhasilan dalam Praktikum 1 ini tentunya tidak lepas dari semua do’a dan usaha dari berbagai pihak yang terlibat, terutama kedua orang tua praktikan yang telah mendukung dengan sepenuh hati, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini praktikan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Lina Favourita S, Ph.D Ketua Program Pendidikan Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
3. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
4. Drs. Suradi, M. Si selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah banyak memberikan segala bentuk pengorbbanan baik berupa waktu, tenaga, dan pikiran. Tanpa bantuan beliau, praktikan tidak akan mampu melanjutkan penulisan laporan praktikum laboratorium.
5. Rahmat Taufik. S.T., MM selaku Kepala Lurah Kelurahan Kebon Kangkung yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan praktikum laboratorium.
6. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, fasilitas dan bantuan kepada praktikan selama pelaksanaan praktikum.
7. Holong Putra Agung Sihombing yang selalu mendukung, membantu dan bersedia meminjamkan kendaraan selama sebagai kebutuhan praktikan dalam menjalankan praktikum laboratorium.
8. Siti Fatimah Z.R yang telah menjadi rekan untuk belajar dan berdiskusi dalam penulisan laporan praktikum laboratorium
9. Teman-Teman Kelompok 5 praktikum laboratorium yang telah mendukung serta membantu dalam proses pelaksanaan praktikum laboratorium
10. Seluruh pihak yang telah bersedia menjadi sumber informan dalam proses penulisan laporan praktikum.

Praktikan menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan laporan, semoga bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	2
1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum.....	4
1.4 Proses Praktikum.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM	12
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial	12
2.1.1 Gambaran Umum Masalah	12
2.1.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	14
2.1.3 Asesmen.....	28
2.1.4 Rencana Intervensi.....	33
2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	44
2.2.1 Gambaran Umum Masalah	44
2.2.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	45
2.2.3 Asesmen.....	55
2.2.4 Rencana Intervensi.....	60
2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	71
2.3.1 Gambaran Umum Masalah	71
2.3.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	72
2.3.3 Asesmen.....	76
2.3.4 Rencana Intervensi.....	80
2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan	90
2.4.1 Gambaran Umum Masalah	91
2.4.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	91
2.4.3 Asesmen.....	93
2.4.4 Rencana Intervensi.....	99
2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana	108
2.5.1 Gambaran Umum Masalah	109
2.5.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	110
2.5.3 Asesmen.....	113
2.5.4 Rencana Intervensi.....	118
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	129

3.1 Kesimpulan	129
3.2 Rekomendasi	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Anggaran Biaya Jaminan Sosial.....	36
Tabel 2.2 Alat Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial	37
Tabel 2.3 Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial.....	38
Tabel 2.4 Tabel Jadwal Kegiatan Jaminan Sosial	40
Tabel 2.5 Susunan Acara Pelaksanaan Program Jaminan Sosial.....	43
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Biaya Sumber Dana Bantuan Sosial.....	64
Tabel 2.7 Tabel Alat Dalam Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial	65
Tabel 2.8 Analisis Kelayakan Program Sumber Dana Bantuan Sosial.....	65
Tabel 2.9 Jadwal Kegiatan Sumber Dana Bantuan Sosial	67
Tabel 2.10 Susunan Acara Pelaksanaan Program Sumber Dana Bantuan Sosial ..	69
Tabel 2.11 Rencana Anggaran Biaya Pemberdayaan Sosial	84
Tabel 2.12 Tabel Alat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial.....	85
Tabel 2.13 Analisis Kelayakan Program Pemberdayaan Sosial	85
Tabel 2.14 Jadwal Kegiatan Pemberdayaan Sosial.....	87
Tabel 2.15 Susunan Acara Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial.....	89
Tabel 2.16 Rencana Anggaran Biaya Penataan Lingkungan Sosial	102
Tabel 2.17 Tabel Alat Dalam Pelaksanaan Penataan Lingkungan Sosial.....	103
Tabel 2.18 Analisis Kelayakan Program Penataan Lingkungan Sosial	104
Tabel 2.19 Jadwal Kegiatan Penataan Lingkungan Sosial	105
Tabel 2.20 Susunan Acara Pelaksanaan Penataan Lingkungan Sosial	107
Tabel 2.21 Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana.....	121
Tabel 2.22 Tabel Alat Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	122
Tabel 2.23 Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana	123
Tabel 2.24 Jadwal Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	124
Tabel 2.25 Susunan Acara Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pohon Analisis Masalah Jaminan Sosial.....	30
Gambar 2.2 Pohon Analisis Masalah Sumber Bantuan Dana Sosial.....	57
Gambar 2.3 Pohon Analisis Masalah Pemberdayaan Sosial.....	78
Gambar 2.4 Pohon Analisis Masalah Penataan Lingkungan.....	96
Gambar 2.5 Pohon Analisis Masalah Penanggulangan Bencana.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Praktikum	133
Lampiran 2 : Dokumentasi Pembekalan Praktikum Laboratorium.....	135
Lampiran 3 : Dokumentasi Bimbingan Praktikum Laboratorium	137
Lampiran 4 : Dokumentasi Asesmen Lapangan Praktikum Laboratorium.....	138
Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan di Kelurahan.....	140
Lampiran 6 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang Praktikum Laboratorium	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung merupakan Perguruan Tinggi tertua di Indonesia di bawah Kementerian Sosial RI yang telah berdiri sejak tahun 1964 dengan nama sebelumnya yakni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*Classroom Teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*Laboratory Practicum*) *indoor* dan *outdoor*. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial.

Tujuan dari Pelaksanaan Praktikum Laboratorium ini yaitu untuk membuat mahasiswa praktikan memiliki kemampuan dan keterampilan baik dalam praktik mikro, meso ataupun makro yang dapat bekerja secara individu, kelompok, masyarakat bahkan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Pelaksanaan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial memiliki tujuan untuk membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

Pelaksanaan Praktikum Laboratorium secara luring ini menggunakan data primer terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat atau disekitar tempat tinggal praktikan. Praktikum Laboratorium menggunakan data primer berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokasi tempat melakukan praktikum.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Gambaran

masalah yang digunakan praktikan dalam setiap profilnya dijabarkan seperti, pada profil pertama yakni Analisis Jaminan Sosial dengan fokus masalah mayoritas pekerja (pedagang ikan) di Pasar ikan Modern belum terdaftar/mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Profil kedua Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial dengan fokus masalah kurang tepatnya pemegang rekening KPM BPNT yang telah wafat. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial dengan fokus masalah karang taruna Mekar Harapan belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial dengan fokus masalah belum meratanya Penerangan Jalan Umum di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Sedangkan, untuk profil kelima, yakni Analisis Penanggulangan Bencana dengan fokus masalah tingginya resiko banjir di kawasan CPI Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Dengan dilaksanakannya Praktikum Laboratorium mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial dalam lingkup perlindungan dan pemberdayaan sosial.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum

a. Tujuan

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki:

- 1) Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
- 2) Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4) Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 5) Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan Awal
 - b) Asesmen
 - c) Perencanaan Intervensi

b. Manfaat

1) Bagi Mahasiswa

- a) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- c) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan.
- e) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- f) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - (1) Pendekatan awal
 - (2) Asesmen
 - (3) Rencana Intervensi

2) Bagi Lembaga

- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi pra praktikum di desa atau kelurahan tempat tinggal masing-masing praktikan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari - 3 Februari 2023
 - b. Serah Terima Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor) : 6 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan:
 - a. Bimbingan Laporan : 16 - 26 April 2023
 - b. Pendaftaran Ujian : 27 - 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 1-2 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 3 - 10 Mei 2023

1.4 Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh nara sumber yang terdiri dari

- a) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
- b) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

2) Bimbingan pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing Praktikum

- a) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom.
- b) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan.
- c) Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
 - (1) Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
 - (2) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana.
 - (3) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.

- (4) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
- d) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium
- 3) Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum
Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring di Lapangan Poltekesos Bandung yang dilakukan oleh Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial kepada Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

b. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

- a) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, yang dilaksanakan pada Kamis, 02 februari 2023. Dalam pemaparan membahas tentang jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Indonesia yang meliputi
 - (1) Kebijakan dan struktur jaminan sosial.
 - (2) Program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
 - (3) Kelembagaan utama penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.
 - (4) Kebijakan dan penguatan pelaksanaan sistem jaminan sosial.
 - (5) Strategi dan target jaminan sosial dalam RKP 2023.
 - (6) Karakteristik masyarakat yang menerima bantuan sosial di sektor formal dan informal.
 - (7) Tantangan program jaminan sosial di Indonesia: Pekerja informal di Indonesia.
 - (8) Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial
- b) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
 - (1) Pengetahuan
 - (a) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
 - (b) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
 - (c) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
 - (d) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial

(2) Keterampilan

- (a) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (b) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (c) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
- (d) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
- (e) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.

c) Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi:

- (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
- (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
- (3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
- (4) Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial

2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

- a) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heriyanto selaku CSR Manager PT. AAPC Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023. Membahas tentang Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial yang meliputi:
 - (1) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.
 - (2) Model sumber dana bantuan sosial yang digunakan.
 - (3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
 - (4) Merancang program sumber dana bantuan sosial.
 - (5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial.
 - (6) Dimensi dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - (7) Manajemen sumber dana bantuan sosial.
 - (8) Komponen dalam membangun jaringan.
- b) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan
 - (a) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
 - (b) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
 - (c) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
 - (d) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial
- (2) Keterampilan
 - (a) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - (b) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
 - (c) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
 - (d) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
 - (e) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.
- c) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi:
 - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - (2) Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - (3) Melakukan Menyusun Rencana Intervensi
 - (4) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial
- 3) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial**
 - a) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif selaku Projek Manajer Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur yang dilaksanakan pada Rabu, 08 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial yang meliputi:
 - (1) Berbagai isu dan implementasi pemberdayaan sosial.
 - (2) Model pemberdayaan sosial yang digunakan.
 - (3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pemberdayaan sosial.
 - (4) Merancang program pemberdayaan sosial.
 - (5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program pemberdayaan sosial.
 - (6) Stakeholder terkait program pemberdayaan sosial.
 - b) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:

(1) Pengetahuan

- (a) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
- (b) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial.
- (c) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial.
- (d) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
- (e) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial.
- (f) Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.

(2) Keterampilan

- (a) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- (b) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
- (c) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial.
- (d) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
- (e) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial.
- (f) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial.
- (g) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha.
- (h) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha.
- (i) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial.
- (j) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial.

c) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi:

- (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
- (3) Menyusun Rencana Intervensi.
- (4) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial.

4) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- a) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Ade reno, AKS, MSW selaku Deputy I CEO, Islamic Relief Indonesia yang

dilaksanakan pada Kamis, 23 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial yang meliputi:

- (1) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial.
- (2) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan.
- (3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial.
- (4) Merancang program penataan lingkungan sosial.
- (5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial.
- (6) Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial.

b) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan
 - (a) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
 - (b) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
 - (c) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
 - (d) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
 - (e) Menguasai Konsep interaksisosial-ekologi dalam suatu sistem social komunitas dan ekosistem
 - (f) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - (g) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
- (2) Keterampilan
 - (a) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah social
 - (b) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - (c) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

c) Praktik Analisis Sumber Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :

- (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/
- (2) masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
- (3) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
- (4) Menyusun Rencana Intervensi
- (5) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial

5) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

a) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Moh. Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta yang

dilaksanakan pada Rabu, 05 April 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana yang meliputi:

- (1) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
 - (2) Model penanggulangan bencana yang digunakan
 - (3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
 - (4) Merancang program penanggulangan bencana
 - (5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
 - (6) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana
- b) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analisis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
- (1) Pengetahuan
 - (a) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
 - (b) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
 - (c) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
 - (d) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
 - (e) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
 - (2) Keterampilan
 - (a) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
 - (b) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
 - (c) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
 - (d) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
 - (e) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
 - c) Praktik Analisis Penanggulangan Bencana, meliputi:
 - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
 - (2) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - (3) Menyusun Rencana Intervensi
 - (4) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

c. Tahap Pasca Lapangan

- 1) Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum

- 2) Ujian Lisan Praktikum
- 3) Perbaikan dan penyerahan laporan

1.5 Sistematika Penulisan

Pada akhir kegiatan mahasiswa wajib membuat laporan akhir yang mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum. Laporan akhir kegiatan praktikum disusun secara individu berdasarkan sistematika penyusunan laporan sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.
- b. BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM, yang berisi tentang profil Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, Analisis Penanggulangan Bencana Sosial. Dalam masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang nantinya dibahas, asesmen dan rencana intervensi.
- c. BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat kesimpulan akhir praktikum dan rekomendasi yang ditujukan kepada Program Studi perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

Pada BAB II ini praktikan akan membahas terkait 5 (lima) profil yang dilaksanakan dalam kegiatan praktikum laboratrium, yakni Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dalam setiap profil akan dijabarkan tentang gambaran umum, tahapan asesmen sampai pada asesmen, dan yang terakhir rencana intervensi terkait permasalahan tersebut. Adapun pembahasan setiap profil sebagai berikut.

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

Dalam pembahasan analisis jaminan sosial, praktikan memilih isu terkait masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan tanpa premi. Dalam penyusunan laporan praktikum pada profil analisis jaminan sosial, praktikan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth Interview*) yakni wawancara yang dilakukan kepada informan/partisipan yang terpilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai masalah penelitian

Pada tahapan asesmen praktikan menggunakan 5W+1H dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya isu atau masalah jaminan sosial yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung adapun tahapan yang dilakukan oleh praktikan ialah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data atau pedoman wawancara untuk menggali data dan informasi tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya yang relevan dengan profil jaminan sosial
2. Mengidentifikasi dan menentukan informan yang akan memberikan informasi mengenai gambaran isu masalah jaminan sosial. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kelurahan Kebon Kangkung, maka praktikan memperoleh informasi untuk menemui informan yaitu Ibu Wiwin sebagai Kader JKN-KIS
3. Praktikan bertemu informan di Kelurahan Kebon Kangkung dimana dalam wawancara tanggal 3 Maret 2023 menyampaikan bahwa benar masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung ada yang tidak dapat mengakses jaminan Kesehatan karena menunggak kecuai dalam keadaan darurat

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Jaminan sosial menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan jaminan sosial agar dapat hidup sehat produktif dan sejahtera. Dalam menyelenggarakan jaminan sosial maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan merupakan program yang fungsinya mengacu kepada Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan Kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini tentang tingkat Kesehatan dalam masyarakat adalah sulitnya akses dalam pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan, namun juga terjadi dipedesaan, sehingga muncul kata dalam masyarakat bahwa orang miskin dilarang sakit. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Beberapa contoh dapat dilihat di daerah-daerah di Indonesia pada masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau sama sekali tidak ditangani sehingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah bahkan berakibat kematian.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Kesehatan kepada masyarakat, terutama pada orang miskin, yaitu mulai dari Jamkesmas, namun program tersebut dianggap belum efektif berjalan, sehingga akhirnya Pemerintah membentuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan. Implementasi program JKN oleh BPJS Kesehatan dimulai sejak 1 Januari 2014.

Di daerah Kota Bandung tepatnya Kelurahan Kebon Kangkung Program JKN mulai diterapkan, peserta JKN-KIS ada dua kategori yaitu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan NON PBI. Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan. Sedangkan Peserta Non PBI Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Memasuki 2020 pada saat wabah covid-19 masuk ke Indonesia masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Kebon Kangkung kehilangan pekerjaan atau di phk akibatnya mereka tidak bisa membayar iuran jaminan Kesehatan sehingga pembayaran iuran pun mengalami penunggakan dan menurut data Kader JKN-KIS Kelurahan Kebon Kangkung sebanyak 415 masyarakat peserta BPJS Kesehatan mengalami penunggakan karena merasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup saja sudah sangat pas-pasan sehingga di non-aktifkan kepesertaannya yang bisa berakibat jika warga ada yang sakit mereka tidak bisa merasakan fasilitas Kesehatan yang ada kecuali mereka yang dalam kondisi darurat. Hal ini menyebabkan masyarakat meminta bantuan ke Pemerintah Kelurahan setempat untuk bisa dapat menggunakan BPJS gratis. Namun, ternyata BPJS Kesehatan tidak dapat beralih dari premi ke non-premi dan apabila ingin mengakses harus membayar tunggakan tersebut.

Melihat masih banyaknya fenomena tersebut, hal seperti itu bisa dipicu dari kurangnya sosialisasi baik dari penyelenggara program jaminan (BPJS) kepada masyarakat tentang pentingnya program jaminan Kesehatan. Pendataan yang harus benar-benar teliti untuk melihat apakah masyarakat tergolong masyarakat miskin yang harus menjadi peserta JKN (Jamkesmas) atau menjadi peserta JKN yang setiap bulannya harus membayar premi dari Sebagian pendapatannya. Selain pendataan Pemerintah juga harus memperhatikan sumber pendanaan ataupun anggaran untuk menjamin hak mendapat fasilitas Kesehatan kepada masyarakatnya.

2.1.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Konsep Pekerja Penerima Upah (PPU)

1) Pengertian Pekerja Penerima Upah (BPU)

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang beewenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian/Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau PNS dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan adalah PNS yang diperbantukan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi yang menerima perbantuan.

- (3) Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah PNS yang dipekerjakan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- (5) Pegawai Negeri Sipil TNI adalah PNS TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Pegawai Negeri Sipil Polri adalah PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

(7) Prajurit

Prajurit adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

(8) Polri

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

(9) Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang, terdiri dari:

- Presiden dan Wakil Presiden;
- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
- Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iura Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bagian dari segmen Pekerja

Penerima Upah dalam Program JKN-KIS. Adapun yang termasuk dalam kelompok perangkat desa adalah :

Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota

Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

(10) PPNPN

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pegawai tersebut merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu

guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Contoh antara lain:

Pegawai Honorer adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi Pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

(11) PPU Badan Usaha

Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.

Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara (PPU BU) terdiri atas:

Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pegawai pada badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pegawai pada badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pegawai Badan Usaha Swasta (BU Swasta) adalah pegawai pada badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan Usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta dan berbadan hukum. Beberapa jenis BU Swasta yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Perorangan, Perusahaan Persekutuan, Perusahaan Perseroan, Yayasan, dan lain-lain

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;

Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

2) PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ketentuan PHK Dalam Program JKN-KIS

Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Program JKN-KIS paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran. Manfaat Program JKN-KIS yang diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Adapun kriteria PHK yang ditanggung dalam Program JKN-KIS yaitu:

- PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;
- PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;
- PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau
- PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

- Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Manfaat BPJS Kesehatan

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi :

Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:

- Puskesmas atau yang setara
- Praktik Mandiri Dokter
- Praktik Mandiri Dokter Gigi
- Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri
- Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
- Faskes Penunjang: Apotik dan Laboratorium

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

Manfaat yang ditanggung

pelayanan promosi Kesehatan dan pencegahan (promotif preventif):

penyuluhan Kesehatan perorangan;

- imunisasi rutin
- Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN
- Skrining riwayat Kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining Kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu
- peningkatan Kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) mencakup:

- administrasi pelayanan;
- pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
- tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;

- pelayanan obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama
- a. Memeriksa, pengobatan dan tindakan pelayanan Kesehatan gigi tingkat pertama.

Prosedur pelayanan

- Peserta datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar dan mengikuti prosedur pelayanan Kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK).
- Peserta memperoleh pelayanan Kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar.
- Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin, atau dalam keadaan kedaruratan medis, peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP lain yang di luar wilayah FKTP terdaftar, paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.
- Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP.
- Atas indikasi medis apabila peserta memerlukan pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

- Manfaat yang ditanggung
- pendaftaran dan administrasi;
- akomodasi rawat inap;
- pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
- tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
- pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi:
 - persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
 - persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONEB (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar);
 - pertolongan neonatal dengan komplikasi;

- pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
- pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang diberikan oleh:

- Klinik utama atau yang setara
- Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta
- Rumah Sakit Khusus
- Faskes Penunjang: Apotik, Optik dan Laboratorium.

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Manfaat yang ditanggung

- administrasi pelayanan;
- pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat;
- pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
- tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
- pelayanan obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis;
- rehabilitasi medis; dan
- pelayanan darah.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Manfaat yang ditanggung

- perawatan inap non intensif; dan
- perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU).

4) Peserta

- (1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
- (2) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai Pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

- (3) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- (5) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:\
- a. Sebesar Rp. 42.000, - (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
 - Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, -. Sisanya sebesar Rp 16.500,- akan dibayar oleh Pemerintah sebagai bantuan iuran.
 - Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,-, sementara Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,-.
 - b. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
 - c. Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- (6) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
- (7) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan Kesehatan rawat inap. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan Kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan: :
- Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.

- Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

b. Konsep BPJS Kesehatan

1) Pengertian BPJS Kesehatan

Badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI atau POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

2) Visi dan Misi BPJS Kesehatan

Menjadi badan penyelenggara Kesehatan yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan Kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi
2. Menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara Dana Jaminan Sosial dan Biaya manfaat yang terkendali
3. Memberikan jaminan Kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
4. Memperkuat *engagement* dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS
5. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan

3) Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Landasan Hukum BPJS Kesehatan :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [download]
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [download]

Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik antara lain :

1. Pedoman Tata Kelola BPJS Kesehatan
 2. Pedoman Kode Etik BPJS Kesehatan
 3. Pedoman Gratifikasi BPJS Kesehatan
 4. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) BPJS Kesehatan
- 4) Tugas dan fungsi
- Mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan fungsi dan tugas BPJS Kesehatan sebagai berikut:
- Fungsi
- BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
- Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.
- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS Kesehatan bertugas untuk:
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
 2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
 3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
 4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
 5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
 6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
 7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
- 5) Prosedur pendaftaram
- Proses administrasi pendaftaran pada setiap kanal layanan administrasi dilakukan dengan ketentuan:
1. Mengisi FDIPE (Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik);
 2. Melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan; dan
 3. Memberikan persetujuan layanan administrasi.
Persyaratan administrasi kepesertaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan

6) Cara Daftar Peserta PBI JK

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota. yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Cara Mendaftar Menjadi Peserta dari Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah.

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.

Cara Mendaftar Menjadi Peserta PPU Penyelenggara Negara

Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh PIC satuan kerja (satker) dan dapat juga dilakukan secara perorangan.

(1) Syarat pendaftaran apabila pendaftaran dilakukan secara perorangan yaitu dengan menunjukkan:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
- SK Kepangkatan/ pengangkatan terakhir dari Kementerian/ Lembaga/ Kepala Dinas (jika ada perubahan);
- Daftar gaji yang mencantumkan gaji pokok dan tunjangan dan dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
- Penetapan Pengadilan Negeri untuk anak angkat (jika belum tercantum dalam Kartu Keluarga);
- Surat keterangan dari sekolah/ Perguruan Tinggi (bagi anak usia di atas 21 tahun s.d. 25 tahun) yang berlaku 1 (satu) tahun; atau bukti pembayaran uang pendidikan yang masih berlaku sampai dengan bulan pengaktifan.

(2) Pendaftaran diutamakan secara kolektif dilakukan melalui registrasi entitas satuan kerja oleh masing-masing PIC satuan kerja. Kemudian, pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya dilakukan melalui proses migrasi dengan mengisi FDIPE (Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik).

Khusus untuk kepesertaan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa proses pendaftaran dan perubahan data dilakukan secara kolektif oleh penanggung jawab Pemerintah Daerah melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

Masa berlaku kepesertaan mengikuti periode masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa/masa bakti DPRD/masa kerja PPPK.

(3) Cara Mendaftar Menjadi Peserta PPU Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD dan BU Swasta)?

Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja/PIC masing-masing Badan Usaha melalui sistem informasi yang telah

disediakan oleh BPJS Kesehatan atau dengan cara melengkapi Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik (FDIPE) yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh pimpinan perusahaan untuk dimigrasikan di Kantor BPJS Kesehatan.

Syarat pendaftaran Badan Usaha antara lain:

- NIB: Nomor Induk Berusaha
- Badan Usaha baru yang sedang mengurus izin operasional dapat melampirkan Akta Pendirian Badan Usaha.
- Bagi Badan Usaha yang sedang memperpanjang izin operasional dapat melampirkan izin operasional lama.

(4) Cara Mendaftar Menjadi Peserta PBP/PP Selain Penyelenggara Negara

Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta persyaratannya.

Syarat pendaftaran apabila pendaftaran dilakukan secara perorangan yaitu dengan menunjukkan:

- Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- Buku tabungan Bank yang melayani autodebit BNI, BRI, BTN, Mandiri dan BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/ anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/ penanggung);
- Paspor dan surat izin kerja yang diterbitkan instansi beRWenang bagi Warga Negara Asing;

Calon peserta dapat melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran.

Pendaftaran secara kolektif dimungkinkan untuk Mahasiswa dari Perguruan tinggi atau lembaga sejenis, Siswa/santri dari Sekolah/ Pesantren atau lembaga sejenis, Saksi dan Korban dalam Perlindungan Lembaga Hukum, Penghuni Lembaga Perumahan Masyarakat Negara, Panti Sosial, Lembaga atau Badan Amal, Lembaga/ Yayasan atau Badan Sosial, Koperasi Berbadan Hukum serta Program CSR Badan Usaha dengan cara melengkapi Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik (FDIPE) yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimigrasikan di Kantor BPJS Kesehatan.

2.1.3 Asesmen

Dalam penyusunan asesmen, praktikan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus yang merupakan teknik penelitian yang digunakan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan penelaah dokumen, selanjutnya, digunakan data survei ataupun data statistik sebagai pelengkap data yang nantinya dapat dianalisis kemudian ditarik

kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam kegiatan ini praktikan juga menggunakan seperti analisis pohon masalah dan analisis diagram ven

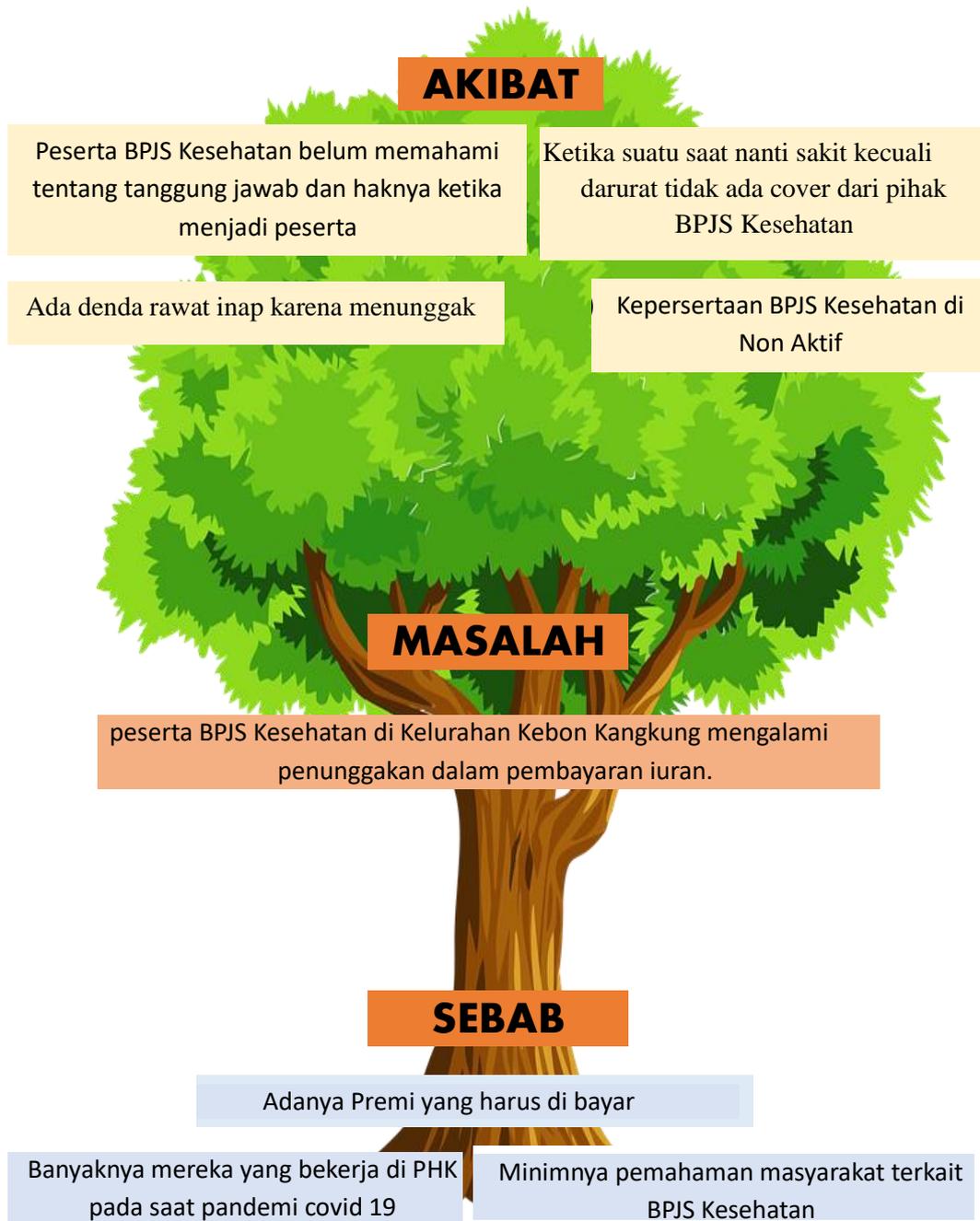
a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Kebon Kangkung sendiri memiliki penduduk 12.899 jiwa yang terdiri dari 2.532 kepala keluarga dengan 6.567 jiwa laki laki dan 6.332 jiwa perempuan. Yang sebagian besar penduduk Kelurahan Kebon Kangkung bekerja sebagai pegawai swasta dan pedagang hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung sebagian besar masyarakatnya bekerja disektor formal dan informal yang berarti Kelurahan Kebon Kangkung rata rata masyarakatnya yang bekerja sebagai penerima upah maupun bukan penerima upah memiliki BPJS Kesehatan.

Ibu Wiwin sebagai kader BPJS Kesehatan menceritakan bahwasannya masyarakat banyak yang menunggak karena pandemi seperti yang jualan jadi tidak bisa jualan karna aksesnya ditutup kemudian dan yang kerja banyak yang di phk mengakibatkan pembayaran BPJS menunggak sehingga merek tidak bisa menggunakan jaminan Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat meskipun menunggak tetap bisa digunakan tetapi ke UHC program Pemerintah kota Bandung tetapi hanya untuk warga kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara 3 Maret 2023 di Kelurahan Kebon Kangkung dengan kader BPJS Kesehatan dapat kita ketahui bahwa sebagian besar peserta BPJS Kesehatan menunggak disebabkan oleh :

1. Adanya premi yang harus dibayarkan , iuran yang harus dibayarkan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang di PHK ataupun tidak bisa berkerja karena kondisi satu dan lain hal.
2. Minimnya pemahaman masyarkat tentang pentingnya program BPJS Kesehatan untuk kehidupan mereka.
3. Edukasi tentang BPJS Kesehatan belum optimal sehingga masyarakat peserta BPJS masih ada yang menunggak



Gambar 2.1 Pohon Analisis Masalah Jaminan Sosial

Berdasarkan hasil analisis sebab-akibat menggunakan pohon masalah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat dari masyarakat Kelurahan Kebon kankung yang mengalami penunggakan dalam pembayaran kepersertaan BPJS Kesehatan

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sebab permasalahan, yakni :

- (a) Adanya premi yang harus di bayar

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan tentunya terdapat iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan mereka sebab, penghasilan mereka saja pas pasan untuk kebutuhan hidup.

- (b) Banyaknya mereka yang bekerja di PHK pada saat pandemi covid 19

Membuat mereka kesulitan dalam membayar karena merasa untuk makan dan hidup saja pas-pasan. Tidak adanya penghasilan karena sudah tidak bekerja menjadi salah satu faktor iuran BPJS Kesehatan mengalami penunggakan

- (c) Minimnya pemahaman masyarakat terkait BPJS Kesehatan

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait mekanisme penggunaan BPJS Kesehatan pada saat sakit kecuali darurat tidak bisa menggunakan fasilitas Kesehatan dari BPJS Kesehatan karena pembayaran yang menunggak

2) Dampak Masalah

Dari gambaran pohon masalah tersebut, ditemukan terdapat 3 dampak permasalahan, yakni :

- (a) Ketika suatu saat nanti sakit kecuali darurat tidak ada cover dari pihak BPJS Kesehatan
- (b) Ada denda rawat inap karena meunggak
- (c) Peserta BPJS Kesehatan belum memahami tentang tanggung jawab dan haknya ketika menjadi peserta
- (d) Kepersertaan BPJS Kesehatan di Non Aktif

3) Fokus Masalah/Masalah inti/Masalah utama

Dari analisis pohon masalah telah tergambar permasalahan utama banyaknya peserta BPJS Kesehatan di Kelurahan Kebon Kangkung mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah yang ada, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan ialah sebagai berikut.

- 1) Pemberian informasi terkait manfaat yang dapat diterima sebagai BPJS Kesehatan

Memberikan informasi tentang manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan tentunya akan memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak telat dalam pembayaran iuran

- 2) Peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran

Memberikan edukasi dan motivasi mengenai Hak, Tanggung Jawab serta Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan

dalam pembayaran iuran agar tidak lagi mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (psks) adalah keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terkait permasalahan yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracandong, kota Bandung potensi dan sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan masalah ialah sebagai berikut.

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yakni berupa dukungan emosional, afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Berikut sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah sebagai berikut.

(a) Keluarga peserta BPJS Kesehatan

keluarga peserta BPJS Kesehatan tentunya dapat memberikan informasi terkait dengan manfaat BPJS Kesehatan

(b) Kader BPJS Kesehatan

Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung tentunya berperan untuk memberikan wawasan dan melakukan pendataan siapa saja masyarakat Kelurahan Kebon kangkung yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan serta siapa saja masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi ataupun asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan kepada anggotanya. Dalam hal ini ialah BAZNAS, BPJS Kesehatan dan kantor pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan baik dari lembaga-lembaga Pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Sistem sumber masyarakat sebagai berikut :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Merupakan lembaga yang bertempat di Kelurahan Kebon Kangkung yang tentunya dapat memberikan arahan tentang manfaat dari BPJS Kesehatan jika melakukan pembayaran tepat waktu

2) Karang Taruna

Karang taruna Kelurahan Kebon Kangkung dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang manfaat BPJS Kesehatan atau

mengadakan kegiatan yang dapat memberikan informasi/wawasan tentang program BPJS Kesehatan.

3) TP-PKK

TP-PKK Kelurahan Kebon Kangkung dapat berperan sebagai penggerak, pendorong keluarga agar membayar iuran tepat waktu.

2.1.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang Kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Masyarakat di Kelurahan Kebon Kangkung sebanyak 451 orang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Data ini berdasarkan hasil wawancara dengan kader BPJS Kesehatan di Kelurahan Kebon Kangkung

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum program penyuluhan sosial mengenai BPJS Kesehatan ini dilaksanakan agar masyarakat khususnya masyarakat peserta BPJS di Kelurahan Kebon Kangkung yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran dapat pemahaman yang lebih tentang manfaat BPJS Kesehatan dan dampaknya jika pembayaran iuran BPJS Kesehatan menunggak.

Tujuan Khusus

- (a) Meningkatkan pemahaman tentang hak, tanggung jawab serta manfaat yang diperoleh sebagai peserta BPJS Kesehatan
- (b) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak telat dan menunggak dalam melakukan pembayaran iuran

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada masyarakat kelurahan Kebon Kangkung sebagai peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan, yakni melalui program “Peningkatan Wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan” yang di dalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan oleh kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung kepada masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan.

Pendataan dilakukan oleh kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung bertujuan untuk mendapatkan data yang valid terkait masyarakat yang mengalami penunggakan. selain melakukan pendataan kader juga akan memberitahukan informasi akan adanya program peningkatan wawasan terkait BPJS Kesehatan.

- 2) Peningkatan wawasan terkait Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan

Peningkatan wawasan merupakan proses perubahan perilaku melalui cara pandang, informasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan maupun tulisan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan peningkatan wawasan yang dilakukan akan diberitahukan informasi mengenai hak, tanggung jawab serta manfaat dari BPJS Kesehatan.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam rencana intervensi dapat diartikan sebagai orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana intervensi. Adapun sistem partisipan dalam program Peningkatan Wawasan mengenai Jaminan Sosial Kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan Kebon Kangkung yang mengalami penunggakan sebagai berikut :

- 1) Sistem inisiator

Sistem inisiator merupakan individu individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Dalam hal ini pekerja sosial merupakan sistem inisiator

- 2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Dalam hal ini ialah pekerja sosial, pegawai kantor Kelurahan Kebon Kangkung, kader BPJS Kesehatan

- 3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ialah masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.

- 4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung ialah individu yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan.

Dalam hal ini ialah rekan keluarga peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran serta kader BPJS Kesehatan .

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan individu yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima ataupun menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini ialah Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan individu yang memiliki tugas rutin dalam melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini ialah masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran, Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung dan kader bjs Kesehatan.

7) Sistem sasaran

Sistem sasaran ialah individu, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat sesuai yang diharapkan. Sistem sasaran dalam hal ini ialah masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini ialah pekerja sosial, Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung , dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran metode yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. Teknik ini diterapkan untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan penyuluhan yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran tentang

2) Teknik Informasi

Teknik informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain. Teknik ini berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada sasaran yakni “Peningkatan Wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan”

3) Teknik Edukasi

Teknik edukasi merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi yang intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif. Penerapan teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan “Peningkatan Wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Anggaran Biaya Jaminan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	150.000	150.000
	Surat Undangan	420	Lembar	500	210.000
	Banner sosialisasi	1	Lembar	50.000	50.000
	Jumlah I				365.000
2.	Transportasi				
	Tamu undangan	420	Orang	50.000	21.000.000
	Panitia	8	Orang	50.000	400.000
	Jumlah II				21.400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	415	Box	5000	2.075.000
	Snack panitia	8	Box	5000	40.000

	Snack tamu undangan	5	Box	10.000	50.000
	Makan siang peserta	415	Box	20.000	8.300.000
	Makan siang panitia	8	Box	20.000	160.000
	Makan siang tamu undangan	5	Box	20.000	100.000

	Jumlah III				10.725.000
	Jumlah Keseluruhan				32.490.000

Tempat pelaksanaan program gedung STT Mandala. “Peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan” untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran adalah halaman pertemuan Selanjutnya, untuk alat yang akan digunakan dalam program ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Alat dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial

No	Alat	Jumlah
1.	<i>Sound System</i>	4
2.	Mikrofon	3
3.	LCD Proyektor	4
4.	Kursi	420
5.	Meja	5
6.	Laptop	2

g. Analisis Kelayakan Program

Hasil analisis kelayakan dari program “Peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan” di Kelurahan Kebon Kangkung ialah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial.

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara jaminan sosial • BPJS Kesehatan diamanati oleh Pemerintah sebagai pelaksana jaminan sosial terhadap kesehatan masyarakat 	<p>Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggapan dari masyarakat bahwa membayar iuran secara menerus tapi tidak pernah dipakai karena belum sakit atau tidak sakit
	<p>Kekuatan (Strength)</p>	<p>Strategi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki landasan hukum yang kuat • Memberikan manfaat berupa pemberian informasi mengenai program BPJS Kesehatan • Program dilaksanakan dengan media daring dan luring 	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS Kesehatan, Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung membuat kerjasama untuk mendorong, mengingatkan peserta program BPJS Kesehatan membayar iuran tepat waktu agar tidak mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran • Adanya kerjasama tersebut mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan memberikan pemahaman dan penyampaian informasi mengenai hak, tanggung jawab, serta manfaat program BPJS Kesehatan. • Adanya pemanfaatan media daring masyarakat yang sambil bekerja ataupun sedang tidak berada di daerah Kelurahan Kebon Kangkung atau yang memiliki

	rancangan peningkatan hak, tanggung jawab, serta manfaat program.	kesibukkan dapat mengetahui informasi BPJS Kesehatan meskipun tidak berada di lokasi pelaksanaan peningkatan wawasan.
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat sebagai peserta program BPJS Kesehatan belum memahami hak, tanggung jawab, serta manfaat dari BPJS Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan materi mengenai risiko yang akan dialami ketika pembayaran iuran BPJS Kesehatan menunggak 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat konsep materi dengan bahasa dan pemaparan yang mudah dipahami oleh masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran

h. Jadwal dan Langkah- Langkah
 1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Jaminan Sosial

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Pendataan masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran di Kelurahan Kebon Kangkung	Mengetahui siapa saja yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran	Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.	Pekerja sosial, Kader BPJS Kesehatan	7 Hari	Panitia Pelaksana
Peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran	Memberikan edukasi peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran	Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.	Pekerja sosial, Kader BPJS Kesehatan	1 Hari	Panitia Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi	Meninjau perkembangan mengenai pemahaman masyarakat.	Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.	Pekerja sosial, Kader BPJS Kesehatan	1 Hari	Panitia Pelaksana

2) Langkah – Langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam program peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran ialah sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1) Membentuk Panitia Kegiatan

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brain storming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

(3) Menyusun Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program Pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

(4) Mempersiapkan Kebutuhan Alat dan Bahan Kegiatan

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

(5) Melakukan *Briefing*

Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

(b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1) Pendataan oleh Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kebon Kangkung

Pendataan yang akan dilakukan oleh Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Kangkung bertujuan untuk mendapatkan data yang valid terkait untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran. Selain melakukan pendataan kader juga akan memberitahukan informasi terkait akan adanya program penyuluhan sosial terkait BPJS Ketenagakerjaan..

(2) Penyuluhan sosial terkait program Program peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan

Penyuluhan sosial merupakan proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan akan diberitahuka Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan informasi mengenai program BPJS Kesehatan bagi pekerja sektor formal dan informal.

Tabel 2.5 Susunan Acara Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

No	Kegiatan	Waktu (WIB)_	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan kegiatan	08.00 - 08.30	30 menit	Panitia
2.	Registrasi peserta	08.30 - 09.00	30 menit	Panitia
3.	Pembukaan	09.00 - 09.15	15 menit	MC
4.	Sambutan	09.15 - 09.45	30 menit	BPJS Kesehatan
5.	Pembacaan Doa	09.45 - 10.00	15 menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan	10.00 - 11.00	60 menit	BPJS Kesehatan
7.	Sesi tanya jawab	11.00 - 11.45	45 menit	Peserta
8.	Dokumentasi	11.45 - 12.00	15 menit	Panitia
9.	Penutup	12.00 - 12.10	10 menit	MC

(c) Tahap Pengakhiran

Dalam tahapan pengakhiran rangkaian kegiatan, terdapat dua kegiatan yakni tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan.

1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

2) Pelaporan Program

Pelaporan Program peningkatan wawasan Hak, Tanggung Jawab serta Manfaat Peserta BPJS Kesehatan merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari

pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni BPJS Kesehatan kota Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapaun indikator keberhasilan Program Penyuluhan Sosial mengenai Jaminan Sosial Kesehatan untuk masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran ialah sebagai berikut:

- Meningkatkan wawasan mengenai pentingnya hak dan tanggung jawab sebagai peserta BPJS Kesehatan
- Meningkatkan pemahaman mengenai manfaat yang diperoleh sebagai peserta BPJS Kesehatan
- Meningkatkan pemahaman terkait dampak jika pembayaran iuran sebagai peserta BPJS Kesehatan Menunggak
- Meningkatkan pemahaman agar tidak lagi menunggak dalam pembayaran iuran

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pada Profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan memilih isu mengenai belum meratanya bantuan yang diberikan oleh Perusahaan (CSR) kepada Posyandu yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dalam menyusun laporan praktikum pada profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni wawancara yang dilakukan kepada informan/partisipan yang terpilih dengan tujuan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai masalah penelitian.

Pada tahapan asesmen praktikan menggunakan 5W+1H dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu atau masalah sumber dana bantuan sosial yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Adapun tahapan yang dilakukan oleh praktikan ialah sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data atau pedoman wawancara untuk menggali data dan informasi tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya yang relevan dengan profil sumber dana bantuan sosial.
- 2) Mengidentifikasi dan menentukan informan yang akan memberikan informasi mengenai gambaran isu masalah sumber dana bantuan sosial. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung yaitu Bapak Andika selaku staf, maka praktikan memperoleh informasi untuk menemui TP-PKK Pokja Posyandu yaitu Ibu Aas
- 3) Praktikan menemui Ibu Aas yang juga beliau sedang berkegiatan di Kelurahan Kebon Kangkung pada hari Kamis, 09 Maret 2023.

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Pos pelayanan terpadu posyandu (posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Kesehatan yang berumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dari,

oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan bagi, ibu, bayi, dan anak balita

Upaya peningkatan peran dan fungsi osyandu bukan semata- mata tanggung jawab Pemerintah saj, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi Kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan pembina dari posyandu yaitu TP-PKK posyandu dyang ada di Kelurahan Kebon Kangkung sebanyak 3 dari 11 posyandu yang mendapatkan bantuan dana dari perusahaan CSR. selanjutnya berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan pengurus posyandu. Bantuan dana tersebut tidak merata karena tidak ada inisiatif dari pengurus di masing masing posyandu untuk mengajukan proposal hal ini yang menyebabkan CSR hanya berkontribusi di beberapa posyandu

2.2.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Konsep CSR

1) Pengertian CSR

CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Berbagai macam pihak yang dimaksud di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pihak Pemerintah, dan masyarakat yang ada di ruang lingkup perusahaan tersebut.

Bentuk tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat sosial serta lingkungan sekitar. Dimana perusahaan itu melakukan segala aktivitas operasionalnya.

Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka bisnis tersebut akan terancam mendapatkan sanksi. Hal tersebut berlaku untuk bisnis yang sudah besar ataupun bisnis yang masih kecil ya. Selagi bisnis tersebut memang berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya.

CSR memiliki bentuk yang sangat beragam. Dimana setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam melaksanakannya. Biasanya, perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari empat metode berikut ini:

a) Keterlibatan Langsung

Model keterlibatan langsung adalah sebuah metode dimana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pihak perusahaan kepada masyarakat.

b) Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial

Model melalui sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun yayasan sosial sendiri. Tujuan dari model CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan.

c) Menjalin Kemitraan

Model ini dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar atau pihak lainnya. Mitra yang diajak bekerjasama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial, lembaga sosial yang dikelola oleh swasta maupun Pemerintah, dan lainnya

d) Bergabung Dengan Konsorsium

Model yang terakhir adalah dengan bergabung maupun hanya mendukung konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek. Dimana proyek tersebut merupakan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya saja, proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan.

2) Tujuan CSR

Dalam melakukan program-program CSR, perusahaan tersebut harus mempunyai beberapa tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut harus tetap berkaitan dengan kesejahteraan dan kebermanfaatannya untuk masyarakat dan pihak-pihak yang ada di perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dari program CSR secara umum:

a) Nama Baik dan Citra Perusahaan

Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. Biasanya, program CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tak hanya itu, dengan melaksanakan program CSR, maka perusahaan tersebut juga dapat meningkatkan citra dan nama baik perusahaan di lingkungan sekitar dan juga ke semua stakeholder atau orang-orang yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Sehingga hal itu akan sangat berpengaruh baik bagi perkembangan perusahaan di masa depan.

b) Menjaga Hubungan Baik Dengan Stakeholder

Tujuan berikutnya dari pelaksanaan program CSR yaitu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Tak hanya itu, program CSR juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri.

c) Solusi Untuk Menyelesaikan Masalah yang Terjadi di Sekitar Lingkungan

Adanya sebuah perusahaan disuatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu cara agar masalah yang ada disekitar bisa terselesaikan yaitu dengan mengadakan program CSR. Masalah yang ada bisa muncul dari berbagai sisi. Mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Adanya program CSR menjadi salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar.

3) Manfaat CSR (Corporation Social Responsibility)

a) Untuk Perusahaan

Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu Grameds ketahui yaitu ada tiga. Pertama yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Kedua yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu.

b) Manfaat Untuk Masyarakat Umum

Sedangkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam berbagai aspek. Dimana masyarakat yang ada disekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung. Baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan.

c) Untuk Pihak Lain

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja. Tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, Pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham antara lain perusahaan akan mendapatkan citra yang baik. Sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian manfaat untuk Pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR. Mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan.

4) Jenis-Jenis Program CSR

a) *Cause Promotions*

Jenis program CSR yang satu ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan. Adapun tujuan lain dari jenis CSR tersebut yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Dalam melaksanakan program CSR jenis ini, nantinya pihak perusahaan akan memberikan dana serta sumber daya sebagai upaya mendukung kegiatan sosial. Mulai dari kegiatan *community service* dan kegiatan donasi.

b) *Cause Related Marketing*

Perusahaan yang menggunakan program CSR yang satu ini biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu. Supaya dapat mendukung kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dana yang akan diberikan nantinya disumbangkan kepada pihak yang terlihat.

c) *Corporate Societal Marketing*

Jenis CSR yang satu ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya, bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan berupa isu Kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya. Adapun tujuan dari CSR "*Corporate Societal Marketing*" yaitu supaya bisa membantu dalam mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

d) *Corporate Philanthropy*

Jenis CSR tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana. Adapun contoh dari CSR jenis ini yaitu program

sumbangan, charity, dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.

e) *Community Volunteering*

Community Volunteering merupakan salah satu jenis CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Biasanya, perusahaan akan melibatkan sejumlah karyawannya untuk mau menyisihkan waktu mereka secara sukarela dalam berbagai aktivitas yang bisa mendukung keberlangsungan lingkungan yang ada disekitar perusahaan.

f) Rehabilitasi Alam

Jenis CSR selanjutnya adalah program rehabilitasi alam. Disini perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan limbah. Adapun beberapa contoh program rehabilitasi yang bisa dilakukan antara lain, penanaman bakau, reboisasi hutan, penanaman bibit tanaman produktif, dan lainnya.

g) Pengelolaan Limbah yang BerWawasan Lingkungan

Berikutnya adalah pengolahan limbah yang berWawasan lingkungan. Dengan adanya pengelolaan ini diharapkan bisa meminimalisir toksisitas limbah. Sehingga ketika membuang limbah hasil produksi, maka limbah tersebut tidak akan merusak lingkungan sekitarnya. Untuk bisa melakukan program yang satu ini, pihak perusahaan perlu memilih dulu jenis limbahnya, mulai dari limbah organik, beracun, dan anorganik. Kemudian, pihak perusahaan wajib mengelola limbah tersebut dengan cara mengolahnya menggunakan teknik khusus yang sesuai supaya bisa diserap oleh alam dengan baik.

h) Penggunaan Sumber Energi Terbarukan

Adapun jenis lain dari CSR yaitu dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Mulai dari uap alam, angin, air, dan juga tenaga surya. Dengan menggunakan cara tersebut, diharapkan perusahaan bisa ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang sudah mulai terancam punah, seperti halnya gas alam dan minyak bumi.

b. Konsep Posyandu

1) Pengertian Posyandu

Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita

2) Landasan hukum

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin Praktik Bidan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140.05/292 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

3) Tujuan Posyandu

Tujuan Umum

Menunjang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Khusus

- Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan peran lintas sector dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan Kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

4) Sasaran

Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya:

- Bayi
- Anak balita
- Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui
- Pasangan Usia Subur (PUS)

5) Fungsi

- Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB dan AKABA.
- Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan Kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

6) Manfaat Posyandu

Bagi Masyarakat

- Untuk memperoleh informasi Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA).
- Memperoleh layanan yang baik dan professional
- Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan dasar

Bagi Puskesmas

- Mengoptimalkan kinerja puskesmas sebagai pusat penggerak
- pembangunan berWawasan Kesehatan, pusat pemberdayaan
- Kesehatan, dan sebagai pusat pelayanan Kesehatan
- Dapat lebih spesifik membantu masyarakat
- Mendekatkan akses pelayanan Kesehatan bagi masyarakat

Bagi Sektor lain

- Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah Kesehatan terutama menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita sesuai dengan kondisi setempat.
- Meningkatkan efisisensi pemberian pelayanan Kesehatan secara terpadu sesuai dengan kinerja atau tugas masing- masing

7) Kedudukan Posyandu

- Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan
Pemerintahan desa/Kelurahan adalah instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di desa/Kelurahan. Kedudukan Posyandu terhadap Pemerintahan desa/Kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintahan desa/Kelurahan.
- Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja (Pokja)
Posyandu Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/Kelurahan. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.
- Kedudukan Posyandu Terhadap Berbagai UKBM
UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, yang salah satu di antaranya adalah Posyandu Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/LSM desa/Kelurahan yang bergerak di bidang Kesehatan adalah sebagai mitra.
- Kedudukan Posyandu Terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan
Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM. Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan Kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan

masyarakat di bidang Kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas

8) Kader Posyandu

Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

9) Kegiatan posyandu

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut:

10) Kegiatan Utama

- Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- Keluarga Berencana (KB)
- Imunisasi
- Gizi
- Pencegahan dan Penanggulangan Diare

11) Pembiayaan

Sumber Biaya

Pembiayaan Posyandu berasal dari berbagai sumber, antara lain:

Masyarakat:

- Iuran pengguna/pengunjung Posyandu.
- Iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat.
- Sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat.
- Sumber dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infaq, sodaqoh (ZIS), kolekte, punia paramitha, dan sebagainya.

Swasta/Dunia Usaha

Peran aktif swasta/dunia usaha juga diharapkan dapat menunjang pembiayaan Posyandu. Misalnya dengan menjadikan Posyandu sebagai anak angkat perusahaan. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Posyandu.

Hasil Usaha

Pengurus dan kader Posyandu dapat melakukan usaha yang hasilnya disumbangkan untuk biaya pengelolaan Posyandu. Contoh kegiatan usaha yang dilakukan antara lain:

- Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- Hasil karya kader Posyandu, misalnya kerajinan, Taman Obat Keluarga (TOGA)

Pemerintah

Bantuan dari Pemerintah terutama diharapkan pada tahap awal pembentukan, yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan prasarana Posyandu yang bersumber dari dana APBN,

APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

12) Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana

Pemanfaatan Dana

Dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, antara lain dalam bentuk:

- Biaya operasional Posyandu.
- Biaya penyediaan PMT.
- Pengganti biaya perjalanan kader.
- Modal usaha KUB.
- Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu. Dana harus disimpan ditempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil.

Untuk keperluan biaya

rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggungjawab.

13) Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Posyandu buka dalam 1 kali per bulan hari dan waktu ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, tempat penyelenggara posyandu harus dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar seperti di salah satu halaman rumah warga, balai dusun Rt / RW, balai desa.

14) Kegiatan pelaksanaan

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu minimal jumlah kader adalah 5 (lima) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan oleh Posyandu, yakni yang mengacu pada sistim 5 langkah. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggungjawab pelaksanaannya secara sederhana.

15) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh kader segera setelah kegiatan dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format baku sesuai dengan program Kesehatan, Sistim Informasi Posyandu (SIP) atau Sistim

Informasi Manajemen (SIM) yakni:

- Buku register kelahiran dan kematian bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas.
- Buku register Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS).

- Buku register bayi dan balita yang mencatat jumlah seluruh bayi dan balita di wilayah Posyandu.
- Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Posyandu.
- Buku catatan kegiatan usaha apabila Posyandu menyelenggarakan kegiatan usaha.
- Buku pengelolaan keuangan.
- Dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan kebutuhan Posyandu yang bersangkutan

Pelaporan

Pada dasarnya kader Posyandu tidak wajib melaporkan kegiatannya kepada Puskesmas ataupun kepada sektor terkait lainnya. Bila Puskesmas atau sektor terkait membutuhkan data tertulis yang terkait dengan pelbagai kegiatan Posyandu, Puskesmas atau sektor terkait tersebut harus mengambilnya langsung ke Posyandu. Untuk itu setiap Puskesmas harus menunjuk petugas yang bertanggungjawab untuk pengambilan data hasil kegiatan Posyandu

2.2.3 Asesmen

Dalam penyusunan asesmen, praktikan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan teknik penelitian yang digunakan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan penelaahan dokumen. Selanjutnya, digunakan data survei ataupun data statistik sebagai pelengkap data yang nantinya dapat dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil kegiatan. Dalam kegiatan ini praktikan juga menggunakan teknik seperti analisis pohon masalah

a. Identifikasi Masalah

Program posyandu diselenggarakan oleh Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Setiap RW di Kelurahan Kebon Kangkung memiliki posyandu. Dalam menjalankan program posyandu dana yang digunakan bersumber dari masyarakat, Pemerintah hasil usaha serta swasta/dunia usaha.

Posyandu di Kelurahan Kebon Kangkung Sebanyak 2 RW yaitu RW 3 dan RW 6 mendapat bantuan dana dari perusahaan (CSR) yang ada di sekitar daerah Kelurahan Kebon Kangkung karena inisiatif dari ketua RW ataupun kader posyandu untuk mengajukan proposal serta MoU kepada perusahaan yang ada di sekitar daerah Kelurahan Kebon Kangkung. Dana tersebut dikelola oleh kader atau bendahara yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk keperluan posyandu seperti pemberian makanan tambahan (pmt) ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan posyandu. adapun bantuan yang diberikan kepada posyandu lain hanya pada saat tertentu seperti bulan penimbangan ataupun saat

posyandu buka tetapi tidak berkelanjutan seperti dua RW tersebut. Tidak adanya bantuan yang berkelanjutan pastinya suatu saat akan menghambat jalannya dari program posyandu.

Ibu Aas sebagai TP-PKK sekretaris pokja posyandu dan pengurus posyandu RW 3 Kelurahan Kebon Kangkung pada 9 Maret 2023 mengatakan bahwa belum meratanya bantuan dari CSR karena masih kurangnya inisiatif dari pengurus posyandu selain itu juga kemampuan untuk public speaking dari pengurus juga belum maksimal sehingga hanya beberapa posyandu yang menerima bantuan.

Ibu Nita sebagai pengurus posyandu RW 6 mengatakan bahwasannya benar mendapatkan bantuan dana dari perusahaan (CSR). bantuan dari perusahaan (CSR) bisa diberikan berdasarkan informasi dari pengurus posyandu RW 3 setelah itu pengurus posyandu RW 6 belajar bagaimana agar mendapat bantuan seperti posyandu RW 3 dengan mengatur pertemuan kepada perusahaan (CSR) setelah itu mereka juga membuat mou agar bantuan yang dibrikan bisa berkelanjutan dan pastinya bermanfaat dalam jalannya posyandu di RW setempat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh praktikan dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa belum meratanya bantuan yang diberikan perusahaan (CSR) sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan tentang kebermanfaatan perusahaan (CSR) disekitar daerah Kelurahan Kebon Kangkung menyebabkan tidak tahuan tentang peran dari perusahaan yang berada di daerah Kelurahan Kebon Kangkung
2. Kurangnya inisiatif serta mencari informasi dan belajar dari pengurus posyandu yang mendapatkan bantuan dari perusahaan (CSR yang ada di daerah Kelurahan Kebon Kangkung sehingga tidak semua posyandu mendapat bantuan dari perusahaan (CSR)
3. Kurangnya kemampuan public speaking dari pengurus posyandu sehingga dalam meyampaikan informasi tentang apa yang dibutuhkan posyandu dan menjalin kerjasama kepada perusahaan (CSR) kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan tersebut, praktikan melakukan analisa permasalahan menggunakan pohon masalah untuk mengetahui sebab akibat dari permasalahan tersebut, berikut analisis sebab akibat permasalahan menggunakan pohon masalah:



Gambar 2.2 Pohon Analisis Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat dari belum meratanya bantuan yang diberikan oleh perusahaan (CSR) kepada posyandu yang ada dikeluarah Kebon Kangkung.

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah dapat diketahui bahwa terdapat 3(tiga) sebab permasalahan, yakni :

- (a) Kurangnya Pengetahuan tentang kebermanfaatan perusahaan (CSR) disekitar daerah Kelurahan Kebon Kangkung menyebabkan tidak tahuan tentang peran dari perusahaan yang berada di daerah Kelurahan Kebon Kangkung
- (b) Kurangnya inisiatif serta mencari informasi dan belajar dari pengurus posyandu yang mendapatkan bantuan dari perusahaan (CSR yang ada di daerah Kelurahan Kebon Kangkung sehingga tidak semua posyandu mendapat bantuan dari perusahaan (CSR)
- (c) Kurangnya kemampuan public speaking dari pengurus posyandu sehingga dalam meyampaikan informasi tentang apa yang dibutuhkan posyandu dan menjalin kerjasama kepada perususahaan (CSR) kurang maksimal.

2) Dampak Masalah

- (a) Tidak semua posyandu menerima bantuan dari Perusahaan (CSR)
- (b) Posyandu hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah
- (c) Kegiatan di posyandu kurang optimal bervariasi

3) Fokus Masalah/Masalah inti/Masalah utama

Dari analisis pohon masalah telah tergambar permasalahan utama yakni Belum Meratanya Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan (CSR) kepada Posyandu yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah yang ada, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan ialah sebagai berikut.

- 1) Kebutuhan kerjasama posyandu dengan perusahaan (CSR) yang ada didaerah keluarahan Kebon Kangkung agar tidak hanya dua RW mendapatkan bantuan yang digunakan untuk keperluan posyandu dimasing masing RW dalam menjalankan program kegiatan.
- 2) Sosialiasi dan Edukasi tentang keberfungsian serta manfaat perusahaan (CSR) yang ada didaerah Kelurahan Kebon Kangkung.
- 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengurus posyandu dan perusahaan (CSR) yang ada didaerah Kelurahan Kebon Kangkung.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yakni berupa dukungan emosional, afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Dalam hal ini sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ialah antar anggota atau pengurus posyandu.

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi ataupun asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan kepada anggotanya. Dalam hal ini sistem sumber formal yang dimanfaatkan ialah posyandu, pokja posyandu Kantor Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik dari lembaga-lembaga Pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

(a) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Merupakan lembaga yang bertempat di Kelurahan Kebon Kangkung yang tentunya dapat memberikan arahan tentang BPNT dan tentunya memberikan pemahaman terkait kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

(b) PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Kelurahan Kebon Kangkung

Menjadi unit paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu memberikan edukasi terkait suatu keberfungsian dan kebermanfaatn Perusahaan (CSR yang ada didaerah Kelurahan Kebon Kangkung

(c) TP-PKK POKJA POSYANDU

Sebagai kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/ pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung.

2.2.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pos pelyanan terpadu (posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

Sumber Biaya Pembiayaan Posyandu berasal dari berbagai sumber seperti dari masyarakat, swasta/dunia usaha, hasil usaha, dan Pemerintah.

Pemanfaatan Dana diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, seperti Biaya operasional Posyandu, Biaya penyediaan PMT, Pengganti biaya perjalanan kader, Modal usaha KUB, Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. Kemudian dana tersebut dikelola oleh bendahara atau pengurus Posyandu. Dana harus disimpan ditempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggungjawab.

Program posyandu yang dijalankan oleh masing masing RW diKelurahan Kebon Kangkung dua diantaranya mendapatkan bantuan dana dari perusahaan (CSR) yang ada didaerah Kelurahan Kebon Kangkung. bantuan dana tersebut kemudian kelola oleh bendahara atau pengurus posyandu Kelurahan Kebon Kangkung dan digunakan untuk kebutuhan posyandu tersebut hal ini menjadikan kegiatan posyandu yang mendapatkan bantuan dana dari perusahaan (CSR) menjadi banyak dan bervariasi salah satunya pemberian makanan tambahan. Posyandu di RW yang tidak mendapatkan bantuan dana dari perusahaan (CSR) kurang bervariasi dan ada posyandu yang tidak aktif karena mereka hanya mnegharapkan sumber dana bantuan hanya dari Pemerintah karena sebab kurangnya pengetahuan tentang keberfungsian dan kebermanfaatn CSR serta tidak adanya inisiatif untuk menjalin kerjasama kepada perudahaan agar posyandu tetap aktif dan kegiatannya bervariasi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan umum

Tujuan umum pelaksanaan program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR) serta pelatihan

pengurus posyandu Kelurahan Kebon Kangkung untuk memberikan informasi serta edukasi kepada kader ataupun pengurus posyandu yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu Kelurahan Kebon kangkung ialah.

- (a) Memberikan informasi dan edukasi tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR)
- (b) Memberikan pemahaman kepada pengurus posyandu RW bagaimana cara mendapatkan bantuan dana dan bekerjasama dengan perusahaan (CSR)
- (c) Memberikan pelatihan public speaking kepada pengurus posyandu agar bisa lebih baik dalam menyampaikan sesuatu.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada jalannya program posyandu di Kelurahan Kebon Kangkung melalui “peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu RW di Kelurahan Kebon Kangkung yang didalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut:

- (a) Program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR)

Peningkatan wawasan merupakan proses edukasi penyebarluasan informasi, komunikasi dan motivasi baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif. Dalam kegiatan peningkatan wawasan yang akan dilakukan dan diberitahukan edukasi mengenai keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR)

- (b) Pelatihan public speaking untuk kader atau pengurus posyandu melatih kader atau pengurus posyandu tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik serta cara agar bisa dan berani menyampaikan pendapat.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam rencana intervensi dapat diartikan sebagai orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana intervensi. Adapun sistem partisipan dalam program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR) serta pelatihan public speaking bagi pengurus posyandu Kelurahan Kebon kangkung sebagai berikut :

- 1) Sistem inisiator
Sistem inisiator merupakan individu individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Dalam hal ini pekerja sosial merupakan sistem inisiator
- 2) Sistem agen perubahan
Sistem agen perubahan merupakan individu yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Dalam hal ini ialah pekerja sosial, pegawai kantor Kelurahan Kebon Kangkung, TP-PKK Pokja Posyandu.
- 3) Sistem Klien
Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ialah pengurus posyandu di masing masing RW
- 4) Sistem Pendukung
Sistem pendukung ialah individu yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Dalam hal ini ialah rekan sesama pengurus posyandu.
- 5) Sistem Pengontrol
Sistem pengontrol merupakan individu yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima ataupun menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini ialah TP-PKK Kelurahan Kebon Kangkung Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung
- 6) Sistem Pelaksana
Sistem pelaksana merupakan individu yang memiliki tugas rutin dalam melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini ialah masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran, Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung dan kader bjps Kesehatan.
- 7) Sistem sasaran
Sistem sasaran ialah individu, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat sesuai yang diharapkan. Sistem sasaran dalam hal ini ialah pengurus dan anggota posyandu di masing masing RW
- 8) Sistem Aksi
Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini ialah pekerja

sosial, Kader Posyandu, TPPKK Posyandu Kelurahan Kebon Kangkung dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan peningkatan wawasan metode yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi kepada sasaran dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. Teknik ini diterapkan untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan peningkatan wawasan yakni untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kepada pengurus dan anggota masing-masing posyandu tentang keberfungsian dan manfaat dari perusahaan (CSR) yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung

2) Teknik Informasi

Teknik informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain. Teknik ini berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada sasaran yakni mengenai bagaimana cara agar bisa mendapatkan bantuan dana dan kerjasama kepada perusahaan (CSR)

3) Teknik Edukasi

Teknik edukasi merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran melalui pengajaran, penanaman nilai, opini serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi yang intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif. Penerapan teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik serta cara agar bisa dan berani menyampaikan pendapat.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan public speaking bagi pengurus posyandu RW di Kelurahan Kebon Kangkung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tabel Rencana Anggaran Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	150.000	150.000
	Surat Undangan	60	Lembar	500	30.000
	Banner sosialisasi	1	Lembar	50.000	50.000
	Jumlah I				230.000
2.	Transportasi				
	Tamu undangan	60	Orang	50.000	3.000.000
	Panitia	8	Orang	50.000	400.000
	Jumlah II				3.400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	55	Box	5000	275.000
	Snack panitia	8	Box	5000	40.000
	Snack tamu undangan	5	Box	10.000	50.000
	Makan siang peserta	55	Box	20.000	1.100.000
	Makan siang panitia	8	Box	20.000	160.000
	Makan siang tamu undangan	5	Box	20.000	100.000
	Jumlah III				1.360.000
	Jumlah Keseluruhan				4.990.000

Tempat pelaksanaan program gedung STT Mandala dalam pertemuan. Selanjutnya, untuk alat yang akan digunakan dalam program ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Tabel Alat dalam Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Alat	Jumlah
1.	Sound System	4
2.	Mikrofon	3
3.	LCD Proyektor	4
4.	Kursi	420
5.	Meja	5
6.	Laptop	2

g. Analisis Kelayakan Program

Hasil analisis kelayakan dari program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu RW di Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

Tabel 2.8 Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial.

Faktor Internal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu merupakan program yang memiliki dasar hukum • Mendapatkan bantuan dana dari perusahaan (CSR) yang berada di Kelurahan Kebon Kangkung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggapan dari kader, pengurus, dan anggota tentang susahnyanya cara mendapat bantuan dana.
Kekuatan (Strength)	Strategi	Strategi ST
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki aturan tentang sumber dana dalam menjalankan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia bersama TP-PKK Pokja Posyandu, kader, pengurus dan anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat Perusahaan

<p>posyandu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan manfaat berupa pemberian informasi mengenai program “Peningkatan Wawasan tentang Keberfungsian dan Manfaat Perusahaan (CSR) serta Pelatihan Pengurus Posyandu RW di Kelurahan Kebon Kangkung 	<p>Posyandu di masing-masing RW dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung membuat kerjasama antara posyandu yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama memudahkan Posyandu dalam melakukan kegiatan karena mendapat bantuan dana 	<p>(CSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengetahuan tentang cara menjalin kerjasama dengan Perusahaan (CSR) • Memberikan pelatihan tentang bagaimana cara komunikasi serta menyampaikan pendapat dengan baik.
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p>	<p>Strategi WO</p>	<p>Strategi WT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus, kader, anggota posyandu yang belum memahami tentang keberfungsian serta manfaat perusahaan (CSR) serta kemampuan komunikasi dalam menyampaikan pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi mengenai keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta materi public speaking 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat konsep materi dengan bahasa dan pemaparan yang mudah dipahami oleh kader, pengurus, serta anggota Posyandu di masing-masing RW

h. Jadwal dan Langkah- Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.9 Jadwal Kegiatan Sumber Dana Bantuan Sosial

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Peningkatan wawasan kepada kader, pengurus, anggota posyandu	Meeningkatkan wawasan serta memberi pemahaman tentang keberfungsia dan manfaat perusahaan (CSR) yang ada disekitar Kelurahan Kebon Kangkung	Kader, pengurus, anggota posyandu di masing masing RW	Pekerja sosial, TPPKK Pokja Posyandu	1 hari	Panitia Pelaksana
Pelatihan Public Speaking	Pelatihan public speakung agar bisa berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dengan baik	Kader, pengurus, anggota posyandu di masing masing RW	Pekerja sosial, TPPKK Pokja Posyandu	1 Hari	Panitia Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi	Meninjau perkembangan mengenai pemahaman dan keterampilan Kader, pengurus dan anggota posyandu dimasing masing RW.	Kader, pengurus, anggota posyandu di masing masing RW	Pekerja sosial, TPPKK Pokja Posyand	1 Hari	Panitia Pelaksa

2) Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu rw di Kelurahan Kebon sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1) Membentuk Panitia Kegiatan

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brain storming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

(3) Menyusun Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program Pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

(4) Mempersiapkan Kebutuhan Alat dan Bahan Kegiatan

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

(5) Melakukan *Briefing*

Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

(b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program peningkatan wawasan peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu rw di Kelurahan Kebon sebagai berikut:

- 1) Peningkatan wawasan kepada kader, pengurus, anggota posyandu
Peningkatan wawasan dilakukan bertujuan untuk mengedukasi tentang keberfungsian serta manfaat perusahaan (CSR) bagi posyandu yang ada di Kelurahan kenbon Kangkung
- 2) Pelatihan Public Speaking
Pelatihan public speaking agar kader, pengurus dan anggota bisa berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dengan baik untuk memudahkan dalam menjalankan program posyandu karena komunikasi terjalin dengan baik, yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial

Tabel 2.10 Susunan Acara Pelaksanaan Program Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Kegiatan	Waktu (WIB)_	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan kegiatan	08.00 - 08.30	30 menit	Panitia
2.	Registrasi peserta	08.30 - 09.00	30 menit	Panitia
3.	Pembukaan	09.00 - 09.15	15 menit	MC
4.	Sambutan	09.15 - 09.45	30 menit	Perusahaan (CSR)
5.	Pembacaan Doa	09.45 - 10.00	15 menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai Wawasan tentang Keberfungsian Perusahaan (CSR)	10.00 - 11.00	60 menit	Perusahaan (CSR)
7.	Sesi tanya jawab	11.00 - 11.30	30 menit	Peserta
8.	ISHOMA	11.30 – 12.00	30 menit	Peserta
9.	Pelatihan Public Speaking	12.00 – 13.00	60 menit	Pekerja Sosial
10.	Sesi Tanya Jawab	13.00 – 13.30	30 menit	Perusahaan (CSR)
11.	Dokumentasi	13.30 – 13.45	15 menit	Panitia
12.	Penutup	13.45 - 14.00	15 menit	MC

(c) Tahap Pengakhiran

Dalam tahapan pengakhiran rangkaian kegiatan, terdapat dua kegiatan yakni tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

(2) Pelaporan Program

Pelaporan Program peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu rw di Kelurahan Kebon merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni perusahaan (CSR) yang berada di daerah kelurahan Kebon Kungkung kota Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapun indikator keberhasilan Program mengenai peningkatan wawasan tentang keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta pelatihan pengurus posyandu rw di Kelurahan Kebon ialah sebagai berikut:

- Meningkatnya wawasan kader, pengurus dan anggota posyandu di masing masing rw mengenai keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR)
- Meningkatkan pemahaman kader, pengurus dan anggota posyandu di masing masing rwmengenai bagaimana cara abekerjasama dengan perusahaan (CSR) yang berada di Kelurahan Kebon Kungkung
- Kader, pengurus dan anggota posyandu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dengan baik.

2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam pembahasan analisis pemberdayaan sosial, praktikan memilih permasalahan terkait PKK Kelurahan Kebon Kangkung masih kurang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus dan anggota. Dalam penyusunan laporan praktikum pada profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni wawancara yang dilakukan kepada informan/partisipan yang terpilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai penelitian.

Pada tahap asesmen praktikan menggunakan 5W-1H dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu atau masalah pemberdayaan sosial yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan Kiaracondong, kota Bandung, adapun tahap yang dilakukan oleh praktikan ialah sebagai berikut :

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data atau pedoman wawancara untuk menggali data dan informasi tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya yang relevan dengan profil pemberdayaan sosial.
- 2) Mengidentifikasi dan menentukan informan yang akan memberikan informasi mengenai gambaran isu masalah pemberdayaan sosial. Praktikan menemui bertemu Ibu Lina dan Ibu Aass sebagai pengurus TP-PKK untuk memperoleh informasi tentang pemberdayaan PKK dengan melakukan wawancara

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kualitas hidup anak dan kesejahteraan serta kualitas keluarga Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perempuan melalui sektor UMKM, upaya untuk mengurangi angka pekerja anak, dan menekankan pentingnya perlindungan bagi anak, serta bagaimana pemberdayaan perempuan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia perlu dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Untuk itu komitmen bersama bagaimana pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kualitas keluarga Indonesia yang lebih baik

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang juga merupakan mitra kerja Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat

sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung memiliki Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan informasi yang praktikan dapatkan dari beberapa pengurus PKK ibu aas, ibu nita dan ibu lina pengurus PKK masih kurang dalam memahami tugas pokok dan fungsi dari PKK

2.3.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ketimpangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kebutuhan dasar yang tidak memadai/tidak konsisten. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, Kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses lahan yang terbatas meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat besar, melemahnya metode/tradisi pasar lokal ketika digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah ketertinggalan bersifat struktural (politik) dan kultural (Sunnyoto Usman, 2004).

3) Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut (Adi, 2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

a) Tahap persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

b) Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

c) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d) Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

e) Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat

melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antara Warga.

f) Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

g) Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut

b. Konsep Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

1) Pengertian PKK

PKK singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

2) Tugas PKK

PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas PKK Kelurahan meliputi :

- Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan,
- RW dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang
- mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/Kelurahan.
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- Melaksanakan tertib administrasi.
- Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK
- setempat.

3) Fungsi PKK

PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
- fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

4) Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK, yaitu:

- Penghayatan dan Pengamatan Pancasila
- Gotong Royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Pendidikan dan Keterampilan
- Kesehatan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat

Untuk efisiensi kerja dalam pengurusan PKK maka telah diadakan pembagian tugas, wewenang pengurus, sesuai porsi dan bidang tugasnya :

- Ketua TP PKK : Bertanggung jawab pada semua kegiatan yang dilaksanakan
- Wakil Ketua : Membidangi Sekretaris, Bendahara, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV

- Sekretaris : Urusan umum, Tata Usaha/Rumah Tangga, Sekretariat, Pelaporan, Evaluasi, Monitoring, Urusan Organisasi, Humas dan Dokumentasi
- Bendahara : Mengelola kas umum, Block Grant dengan tertib administrasi
- Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
- Pokja II : Pendidikan dan Keterampilan
- Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
- Pokja IV : Kesehatan Ibu, anak dan balita dan Ibu hamil dan menyusui, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat

2.3.3 Asesmen

Dalam penyusunan asesmen, praktikan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan teknik yang digunakan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan penelaah dokumen. Selanjutnya digunakan data survei ataupun data statistik sebagai pelengkap data yang nantinya dapat dianalisis kemudian di tarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini praktikan juga menggunakan teknik analisis menggunakan pohon masalah.

a. Identifikasi Masalah

Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) organisasi kemasyarakatan yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung. PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK Serta fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK..

Ibu Aas pengurus PKK pada 9 Maret 2023 mengatakan bahwa PKK baik di RW maupun di Kelurahan masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi hal ini beliau sampaikan karena melihat kondisi dilapangan dimana PKK pengurus dan anggota yang bekerja hanya beberapa saja dan mengambil tugas pengurus lain karena tidak adanya kemampuan untuk tugas dan fungsi tersebut. Menurut beliau hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Kurangnya pemahaman PKK terkait tupoksi dari PKK tidak ada pelatihan khusus untuk masing-masing tupoksi Anggota PKK memiliki kesibukkan masing-masing.

Selanjutnya ibu lina juga sebagai pengurus PKK Kelurahan mengatakan bahwasannya pengurus baik ditingkat RW maupun Kelurahan

masih belum memahami terkait dengan tupoksi dari PKK sehingga terkadang kegiatan PKK berjalan tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan, dapat diketahui bahwa belum optimalnya PKK RW dan Kelurahan Kebon Kangkung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman PKK terkait tupoksi dari PKK, beberapa anggota PKK Kelurahan Kebon Kangkung belum memahami dengan baik tentang tupoksi dari organisasi tersebut.
2. Tidak ada pelatihan khusus untuk masing-masing tupoksi, hal ini membuat pengurus dan anggota PKK bingung mengenai tugas pokok dan fungsi mereka karena tidak semua yang bergabung dalam PKK pernah mengikuti organisasi sebelumnya.
3. Anggota TP-PKK memiliki kesibukkan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahawasaannya latar belakang dari pengurus dan anggota PKK juga berbeda beda dan kesibukkan juga berbeda sehingga yang sering mengikuti dan membantu PKK dalam berkegiatan hanya itu saja.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan tersebut, praktikan selanjutnya melakukan analisa permasalahan menggunakan analisis pohon masalah untuk mengetahui sebab akibat dari permasalahan tersebut, berikut analisis sebab akibat permasalahan menggunakan pohon masalah :



Gambar 2.3 Pohon Analisis Masalah Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat dari belum optimalnya pengurus PKK dalam menjalankan tupoksi ialah sebagai berikut :

1. Penyebab Masalah

Kurangnya pemahaman PKK terkait tupoksi dari PKK, beberapa anggota PKK Kelurahan Kebon Kangkung belum memahami dengan baik tentang tupoksi dari organisasi tersebut.

- (a) Tidak ada pelatihan khusus untuk masing-masing tupoksi, hal ini membuat pengurus dan anggota PKK bingung mengenai tugas pokok dan fungsi mereka karena tidak semua yang bergabung dalam PKK pernah mengikuti organisasi sebelumnya.
- (b) Anggota TP-PKK memiliki kesibukkan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahawasanya latar belakang dari pengurus dan anggota PKK juga berbeda beda dan kesibukkan juga berbeda sehingga yang sering mengikuti dan membantu PKK dalam berkegiatan hanya itu saja.

2. Dampak Masalah

Dari gambaran pohon masalah tersebut, terdapat 3 dampak permasalahan, yakni :

- (a) Anggota PKK kurang memahami terkait apa yang harus dikerjakan, akibat dari kurangnya pemahaman anggota PKK terkait tupoksi PKK menjadikan tidak paham dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang baik
- (b) Tidak maksimalnya PKK dalam menjalankan tupoksi, akibat dari kurangnya pemahaman terkait tupoksi hal ini menjadikan PKK mtidak maksimal dalam menjalankan kegiatan
- (c) Dalam menyiapkan kegiatan PKK yang hadir hanya yang berkemampuan atau hanya orang itu itu saja. Hal ini berdampak bahawasanya tidak semua pengurus atau anggota PKK aktif karena merasa tidak bisa sehingga yang bekerja hanya orang yang sama seperti kegiatan kegiatan lainnya yang sudah dijalankan.

3. Fokus Masalah/Masalah inti/Masalah utama

Dari analisis pohon masalah yang telah tergambar pemasalahan utama ialah Belum Optimalnya PKK dalam Menjalankan Tugas Pokok, Peran dan Fungsi yang telah disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dijabarkan di atas.

a. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah yang ada, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan ialah sebagai berikut.

Pelatihan dasar organisasi PKK dikeluarahan Kebon Kangkung

Dalam hal ini diberikan pelatihan dasar organisasi agar pengurus ataupun anggota PKK dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan

keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan.

b. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terkait permasalahan yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong kota Bandung potensi dan sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan masalah ialah sebagai berikut.

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yakni berupa dukungan emosional, afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Berikut system sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ialah SDM PKK yang memahami terkait tugas dan fungsi PKK tentunya dapat memberikan informasi terkait wawasan dan pemahaman tersebut masyarakat

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi ataupun asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan kepada anggotanya. Dalam hal ini ialah perangkat Kelurahan Kebon Kangkung yang merupakan pengurus PKK Kelurahan Kebon Kangkung.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik dari lembaga-lembaga Pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan ialah ialah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang merupakan lembaga bertempat di Kelurahan kebun Kangkung yang tentunya dapat memberikan arahan tentang tugas dan fungsi dari PKK

2.3.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kualitas hidup anak dan kesejahteraan serta kualitas keluarga Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perempuan melalui sektor UMKM, upaya untuk mengurangi angka pekerja anak, dan menekankan pentingnya perlindungan bagi anak, serta bagaimana pemberdayaan perempuan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga di

Indonesia perlu dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Untuk itu komitmen bersama bagaimana pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kualitas keluarga Indonesia yang lebih baik

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang juga merupakan mitra kerja Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung memiliki Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Namun, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan praktikan dengan beberapa informan yang bahwasannya belum optimalnya PKK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari PKK

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum

Program peningkatan wawasan dan pelatihan dasar organisasi kepada PKK di Kelurahan Kebon Kangkung agar pengurus ataupun anggota PKK dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan.

Tujuan khusus

- (a) Meningkatkan pemahaman tentang organisasi PKK
- (b) Meningkatkan pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi PKK
- (c) Meningkatkan peran PKK dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kebon Kangkung

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada peningkatan wawasan serta pelatihan dasar organisasi PKK di Kelurahan Kebon Kangkung agar dapat optimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan.. hala tersebut diimplementasikan melalui program “PKK Berdaya, Keluarga Sejahtera” dimana dalam program tersebut terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan wawasan PKK diKelurahan Kebon Kangkung dalam peningkatan wawasan akan diberikan materi tentang organisasi PKK serta tugas pokok fungsi dari PKK Kelurahan
 - 2) Pelatihan dasar organisasi PKK dikeluarahan Kebon Kangkung
 Dalam hal ini diberikan pelatihan dasar organisasi agar pengurus ataupun anggota PKK dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan.
- d. Sistem Partisipan
- Sistem partisipan dalam rencana intervensi dapat diartikan sebagai orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana intervensi. Adapun sistem partisipan dalam program “pentingnya Bank Sampah dan pelatihan tata kelola bank sampah” ialah sebagai berikut :
- 1) Sistem Inisiator
 Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. dalam hal ini pekerja sosial merupakan sistem inisiator.
 - 2) Sistem Agen Perubahan
 Sistem agen perubahan merupakan individu yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Dalam hal ini ialah pekerja sosial, pengurus lpm, pegawai Kelurahan Kebon Kangkung
 - 3) Sistem Klien
 Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ialah pengurus atau anggota PKK
 - 4) Sistem Pendukung
 Sistem pendukung ialah individu yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Dalam hal ini ialah rekan sesama anggota PKK
 - 5) Sistem Pengontrol
 Sistem pengontrol merupakan individu yang memiliki otoritas foral atau kekuasaan untuk menerima ataupun menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini ialah Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.
 - 6) Sistem Pelaksana
 Sistem pelaksana merupakan individu yang memiliki tugas rutin dalam melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini ialah pengurus atau anggota PKK dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran ialah individu, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat sesuai yang diharapkan. Sistem sasaran dalam hal ini ialah pengurus atau anggota PKK

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini ialah pekerja sosial, dan Pemerintah Kelurahan KebonKangkung

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan Penyuluhan sosial mengenai peningkatan wawasan dan pelatihan dasar organisasi PKK diKelurahan Kebon Kangkung yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. Teknik ini diterapkan untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan peningkatan wawasan dan pelatihan dasar organisasi PKK diKelurahan Kebon Kangkung

2) Teknik Informasi

Teknik informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain. Teknik ini berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada sasaran yakni pengurus serta anggota PKK Kelurahan Kebon Kangkung

3) Teknik Motivasi

Teknik motivasi merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam meujudkan tujuan yang hendak dicapai. Teknik ini bertujuan untuk mendorong pengurus PKK agar mampu menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

4) Teknik Edukasi

Teknik edukasi merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi yang intensif maupun proses proses pembelajaran yang kondusif. Penerapan teknik ini bertujuan dengan memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari PKK mengenai organisasi PKK

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan “Program Peningkatan Wawasan dan Pelatihan Dasar organisasi PKK di Kelurahan Kebon Kangkung” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rencana Anggaran Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	150.000	150.000
	Surat Undangan	60	Lembar	500	30.000
	Banner sosialisasi	1	Lembar	50.000	50.000
	Jumlah I				230.000
2.	Transportasi				
	Tamu undangan	60	Orang	50.000	3.000.000
	Panitia	8	Orang	50.000	400.000
	Jumlah II				3.400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	55	Box	5000	275.000
	Snack panitia	8	Box	5000	40.000
	Snack tamu undangan	5	Box	10.000	50.000
	Makan siang peserta	55	Box	20.000	1.100.000
	Makan siang panitia	8	Box	20.000	160.000
	Makan siang tamu undangan	5	Box	20.000	100.000
	Jumlah III				1.360.000
	Jumlah Keseluruhan				4.990.000

Tempat pelaksanaan program gedung STT Mandala dalam pertemuan. Selanjutnya, untuk alat yang akan digunakan dalam program ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Tabel Alat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

No	Alat	Jumlah
1.	Sound System	4
2.	Mikrofon	3
3.	LCD Proyektor	4
4.	Kursi	420
5.	Meja	5
6.	Laptop	2

g. Analisis Kelayakan Program

Hasil analisis kelayakan dari program Program Peningkatan Wawasan dan Pelatihan Dasar organisasi PKK di Kelurahan Kebon Kangkung” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial.

Faktor Internal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • PKK Merupakan organisasi yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan keluarga. • PKK memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Presepsi masyarakat terkait PKK hanya tempat ibu ibu gosip.
Kekuatan (Strength)	Strategi	Strategi ST
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki landasan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia bersama TP-PKK Pokja 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman dan

<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan manfaat berupa pemberian informasi mengenai tugas, peran dan fungsi PKK 	<p>kader, pengurus dan anggota PKK dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung bersinergi agar sasaran memiliki motivasi dalam mengikuti melakukan hasil dari program \</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama Tersebut meningkatkan tujuan program 	<p>penyampaian informasi tentang tugas, peran dan fungsi PKK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan dasar terkait organisasi PKK
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p>	<p>Strategi WO</p>	<p>Strategi WT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus, kader, anggota posyandy yang belum memahami tentang keberfungsian serta manfaat perusahaan (CSR) serta kemampuan komunikasi dalam menyampaikan pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi mengenai keberfungsian dan manfaat perusahaan (CSR) serta materi public speaking 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat konsep materi dengan bahasa dan pemaparan yang mudah dipahami oleh sasaran

h. Jadwal dan Langkah- Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.14 Jadwal Kegiatan Pemberdayaan Sosial

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Peningkatan wawasan	Meningkatkan wawasan serta memberi pemahaman tentang organisasi PKK serta peran, tugas, dan fungsi PP di Kelurahan Kebon Kangkung	Kader, pengurus, anggota PKK	Pekerja sosial, TPPKK	1 hari	Panitia Pelaksana
Pelatihan Dasar Organisasi PKK	Pelatihan dasar organisasi agar pengurus ataupun anggota PKK dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan.	Kader, pengurus, anggota PKK	Pekerja sosial, TPPKK	1 Hari	Panitia Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi	Meninjau perkembangan mengenai pemahaman dan keterampilan pengurus dan anggota PKK	Kader, pengurus, anggota PKK	Pekerja sosial, TPPKK Pokja Posyandu	1 Hari	Panitia Pelaksana

2) Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam program peningkatan Wawasan dan Pelatihan Dasar organisasi PKK di Kelurahan Kebon sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Membentuk Panitia Kegiatan

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

2) Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan *brain storming* diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

3) Menyusun Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program Pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

4) Mempersiapkan Kebutuhan Alat dan Bahan Kegiatan

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

5) Melakukan *Briefing*

Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program “PKK Berdaya, Keluarg Sejahtera peningkatan” wawasan bagi PKK Kelurahan Kebon sebagai berikut:

1) Peningkatan wawasan PKK Kelurahan Kebon Kangkung

Dsalam peningkatan wawasan akan diberikan materi tentang organisasi PKK serta Peram, tugas dan fungsi PKK Kelurahan Kebon Kangkung

2) Pelatihan Dasar Organisasi

Pelatihan dasar organuisasi agar pengurus, kader ataupun anggota PKK memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan sesuai dengan pekerjaan atau tugas, peran dan fungsi yang mereka lakukan

Tabel 2.15 Susunan Acara Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial

No	Kegiatan	Waktu (WIB)_	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan kegiatan	08.00 - 08.30	30 menit	Panitia
2.	Registrasi peserta	08.30 - 09.00	30 menit	Panitia
3.	Pembukaan	09.00 - 09.15	15 menit	MC
4.	Sambutan	09.15 - 09.45	30 menit	Bapak Lurah
5.	Pembacaan Doa	09.45 - 10.00	15 menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai organisasi PKK	10.00 - 11.00	60 menit	TP-PKK
7.	Sesi tanya jawab	11.00 - 11.30	30 menit	Peserta
8.	ISHOMA	11.30 – 12.00	30 menit	Peserta
9.	Pelatihan Dasar Organisasi	12.00 – 13.00	60 menit	Karang Taruna/LPM
10.	Sesi Tanya Jawab	13.00 – 13.30	30 menit	Perusahaan (CSR)
11.	Dokumentasi	13.30 – 13.45	15 menit	Panitia
12.	Penutup	13.45 - 14.00	15 menit	MC

c) Tahap Pengakhiran

Dalam tahapan pengakhiran rangkaian kegiatan, terdapat dua kegiatan yakni tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan

yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

(2) Pelaporan Program

Pelaporan Program PKK Berdaya, Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kebon merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni LPM, Karang Taruna yang berada di daerah kelurahan Kebon Kangkung kota Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapun indikator keberhasilan Program PKK Berdaya, Keluarga Sejahtera” di Kelurahan Kebon ialah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman tentang organisasi PKK
- Meningkatnya wawasan tentang Tugas, Peran dan Fungsi PKK
- Menjadi pelopor Keluarga Sejahtera

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Dalam pembahasan analisis penataan lingkungan sosial, praktikan memilih permasalahan terkait belum meratanya bank sampah di setiap RW kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung. Dalam penyusunan laporan praktikum pada profil analisis penataan lingkungan sosial, praktikan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni wawancara yang dilakukan kepada informan/partisipan yang terpilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai masalah penelitian

Pada tahap asesmen praktikan menggunakan 5W+1H dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu atau masalah penataan lingkungan sosial yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung. Adapun tahapan yang dilakukan oleh praktikan ialah sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data atau pedoman wawancara untuk
- 2) menggali data dan informasi tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya yang relevan dengan profil penataan lingkungan sosial.
- 3) Mengidentifikasi dan menentukan informan yang akan memberikan informasi mengenai gambaran isu masalah penataan lingkungan sosial.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Bapak Andika staf Kelurahan bahwasannya hanya 2 RW yaitu RW 3 dan RW 1 saja yang memiliki bank sampah dari 11 RW yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung

- 4) Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023 praktikan juga melakukan wawancara dengan ibu Aas mantan dari ketua RW 3 mengatakan benar adanya bank sampah di RW 3 dan berjalan dengan aktif
- 5) Praktikan juga menemui salah satu dari anggota gober dimana beliau mengatakan karena 9 RW lain tidak memiliki bank sampah maka sampah tidak dikelola dan dibuang langsung di tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Kelurahan sukapura dan binong.
- 6) Selanjutnya pada 6 April 2023 praktikan melakukan wawancara dengan bapak sekretaris RW 11 dimana beliau mengatakan kenapa belum ada bank sampah di RW nya karena tidak ada nya lahan yang bisa digunakan untuk menjadi bank sampah serta tidak adanya yang mau jadii pengelola atau pengurus bank sampah.

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.

Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung masih ada 9 RW yang belum memiliki bank sampah dimana daerah tersebut juga merupakan lingkungan yang padat penduduk sehingga sampah yang dihasilkan juga pastinya banyak. Dan pembuangannya langsung di tempat pembuangan sampah sementara diluar Kelurahan Kebon Kangkung yaitu di tempat pembuangan sampah sementara Kelurahan sukapura dan Kelurahan binong yang menyebabkan sampah di TPS tersebut menumpuk karena tidak hanya menampung sampah dari Kelurahan mereka tetapi juga menampung sampah dari Kelurahan Kebon Kangkung

2.4.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

- a) Pengertian bank sampah

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi

sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah daerah (Peraturan Menteri LH No. 14 Tahun 2021).

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga, seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang, untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Hal ini yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dari kegiatan rumah tangga dan agar sampah yang didaur ulang dapat memiliki nilai ekonomis.

b) Tujuan bank sampah

Tujuan utama pembentukan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah sehingga seiring berjalannya waktu juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

c) Manfaat

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Tak hanya itu, bagi masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras.

Belum lagi, bank sampah juga bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah. Tak pelak, salah satu tujuan bank sampah adalah untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, punya nilai ekonomis

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

d) Mekanisme atau tata kelola bank sampah

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif serta terpadu baik dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tersebut dapat

dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah. Hal ini pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) ini, bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah daerah.

Pada pengelolaan sampah, terdapat penanganan sampah yang dilakukan salah satunya yaitu melalui kegiatan pemilahan sampah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

- Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3
- Sampah yang mudah terurai oleh proses alam
- Sampah yang dapat diguna ulang
- Sampah yang dapat didaur ulang
- Sampah lainnya
- Selain itu, pada peraturan ini juga diatur mengenai fasilitas bank sampah yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk fasilitas jenis BSI diharuskan untuk memenuhi syarat:
- Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah
- Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana
- Lokasi mudah diakses
- Tidak mencemari lingkungan
- Memiliki sarana pengolahan sampah
- Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah
- Sedangkan untuk fasilitas jenis BSU haruslah memenuhi syarat:
- Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah
- Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana
- Luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan
- lokasi mudah diakses
- Tidak mencemari lingkungan

2.4.3 Asesmen

Dalam penyusunan asesmen praktikan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan teknik penelitian yang digunakan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan menelaah dokumen. Selanjutnya digunakan data

survei ataupun data statistik sebagai pelengkap data yang nantinya dapat dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

a. Identifikasi Masalah

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah daerah (Peraturan Menteri LH No. 14 Tahun 2021).

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga, seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang, untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Hal ini yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dari kegiatan rumah tangga dan agar sampah yang didaur ulang dapat memiliki nilai ekonomis.

tujuan utama pembentukan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah sehingga seiring berjalannya waktu juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang dikumpulkan kumpulkan.

Bapak andika selaku staf Kelurahan kebun Kangkung menyampaikan bahwa masih 9 RW lagi di Kelurahan Kebon Kangkung yang tidak memiliki bank sampah sehingga sampah dari RW yang tidak memiliki bank sampah tersebut dibuang ke TPS sukapura dan binong

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota gober bahwasannya sampah yang dibuang ke TPS sukapura dan binong menyebabkan penumpukkan dan menimbulkan bau serta pemandangan yang tak enak karena TPS berada di pinggir jalan.

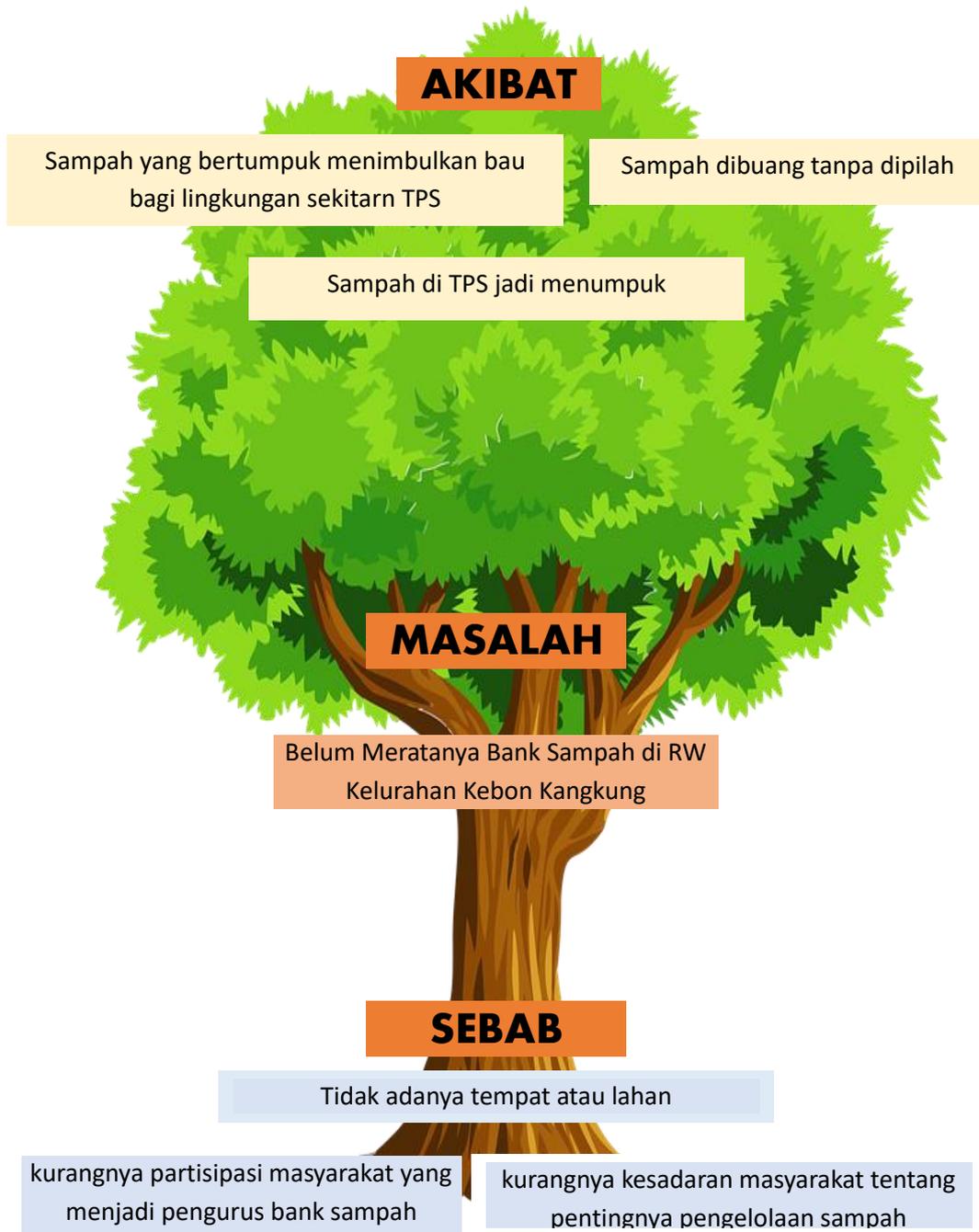
Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak sekretaris RW 11 mengatakan kenapa RW beliau belum ada bank sampah karena tidak ada lahan atau tempat yang bisa digunakan untuk bank sampah serta kurangnya peminat sebagai pengurus atau pengelola bank sampah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh beberapa informan, dapat diketahui bahwa belum meratanya bank sampah

di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracandong, kota Bandung yang dipengaruhi sebagai berikut:

1. Tidak adanya lahan
2. kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah
3. kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi pengurus bank sampah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan tersebut, praktikan selanjutnya melakukan analisa permasalahan menggunakan analisis pohon masalah untuk mengetahui sebab akibat permasalahan menggunakan pohon masalah :



Gambar 2.4 Pohon Analisis Masalah Penataan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis sebab-akibat menggunakan pohon masalah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat dari belum meratanya bank sampah di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracandong, kota Bandung ialah sebagai berikut :

1. Penyebab Masalah

Berdasarkan analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sebab permasalahan, yakni :

- (a) Tidak adanya tempat atau lahan yang bisa dijadikan bank sampah karena lingkungan masing masing RW merupakan lingkungan yang padat penduduk
- (b) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dimana hal ini tentunya berpengaruh dalam menciptakan penataan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.
- (c) kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi pengurus bank sampah dimana jika bank sampah pun hanya dibuat tetapi tidak ada yang mengurus ataupun bersedia untuk mengelola bank sampah maka tujuan dan esensi dari bank sampah tersebut tidak akan tercapai.

2. Dampak Masalah

Dari gambaran pohon masalah tersebut, ditemukan terdapat 3 (tiga) dampak masalah, yakni :

- (a) sampah yang dikumpul dibuang ke pembuangan sampah sementara tanpa dipilah hal ini menjadikan sampah tercampur dengan jenis lainnya sehingga ada yang sulit dimanfaatkan kembali karena sudah tercampur dengan jenis ampah lainnya
- (b) sampah di tempat pembuangan sampah sementara menjadi menumpuk hal ini terjadi karena kapasitas dari penampungan TPS tersebut hanya untuk satu Kelurahan tetapi tapi tersebut juga menampung sampah dari Kelurahan Kebon Kangkung yang belum di[ilah pilah sehingga sampah di TPS tersebut menumpuk
- (c) sampah yang menumpuk menimbulkan bau bagi sekitarnya. Pastinya dari menumpuk dan tidak ada pemilhan menimbulkan bau bagi daerah sekitarnya apalagi tapis didaerah yang banyak pemukiman penduduk atau padat penduduk

3. Fokus Masalah/Masalah inti/Masalah utama

Dari analisis pohon masalah tergambar permasalahan utama iyalah belum meratanya bank sampah diKelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracandong, kota Bandung

a. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan ialah sebagai berikut :

(a) Sosialisasi pentingnya bank sampah

Dalam hal ini akan dilakukan penyuluhan sosial terkait dengan Bank Sampah agar mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya dengan ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang dikumpulkan kumpulkan.

(b) Pelatihan tata kelola bank sampah

Dalam hal ini akan dilakukan kegiatan pelatihan kepada warga yang bersedia jadi pengurus ataupun pengelola bank sampah di masing masing RW sehingga pada saat ada bank sampah di setiap RW tidak kekurangan lagi sumber daya manusia yang mengurus ataupun mengelola bank sampah tersebut

b. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. terkait permasalahan yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung potensi dan sistem sumber yang dapat dimanfaatkan ialah sebagai berikut :

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yakni berupa dukungan emosional, afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Berikut sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ialah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi ataupun asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan kepada anggotanya. Dalam hal ini ialah perangkat Kelurahan Kebon Kangkung yang merupakan pengurus ketua RW Kelurahan Kebon Kangkung

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik dari lembaga-lembaga Pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan ialah LPM, Karang Taruna, Gober merupakan lembaga yang bertempat di Kelurahan Kebon Kangkung

2.4.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah daerah (Peraturan Menteri LH No. 14 Tahun 2021).

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga, seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang, untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Hal ini yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dari kegiatan rumah tangga dan agar sampah yang didaur ulang dapat memiliki nilai ekonomis.

Tujuan utama pembentukan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah sehingga seiring berjalannya waktu juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin di Kelurahan Kebon Kangkung kecamatan kiaracondong masih 9 RW yang belum memiliki bank Bapak andika selaku staf Kelurahan kebun Kangkung menyampaikan bahwa masih 9 RW lagi di Kelurahan Kebon Kangkung yang tidak memiliki bank sampah sehingga sampah dari RW yang tidak memiliki bank sampah tersebut dibuang ke TPS sukapura dan binong.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota gober bahwasannya sampah yang dibuang ke TPS sukapura dan binong menyebabkan penumpukkan dan menimbulkan bau serta pemandangan yang tak enak karena TPS berada di pinggir jalan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak sekretaris RW 11 mengatakan kenapa RW beliau belum ada bank sampah karena tidak ada lahan atau tempat yang bisa digunakan untuk bank sampah serta kurangnya peminat sebagai pengurus atau pengelola bank sampah

b) Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum

Program penyuluhan mengenai pentingnya bank sampah dan dan pelatihan tata kelola bank sampah sebagai bentuk untuk membantu menangani permasalahan sampah serta pengolahan sampah sehingga

seiring berjalannya waktu juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

Tujuan khusus

- (a) Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya bank sampah
- (b) Menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih walaupun penduduknya padat.
- (c) Memberikan pelatihan kepada warga yang bersedia jadi pengurus ataupun pengelola bank sampah di masing masing RW sehingga pada saat ada bank sampah di setiap RW tidak kekurangan lagi sumber daya manusia yang mengurus ataupun mengelola bank sampah tersebut melatih warga

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat Kelurahan Kebon kangkong dalam menjaga lingkungan sekitar. Hal tersebut diimplementasikan melalui program Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah dimana dalam program tersebut terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Sosialisasi pentingnya bank sampah

dalam hal ini akan dilakukan penyuluhan sosial pentingnya bank sampah dan juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

2) Pelatihan tata kelola bank sampah

Dalam hal ini akan dilakukan kegiatan pelatihan kepada warga yang bersedia jadi pengurus ataupun pengelola bank sampah di masing masing RW sehingga pada saat ada bank sampah di setiap RW tidak kekurangan lagi sumber daya manusia yang mengurus ataupun mengelola bank sampah tersebut

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam rencana intervensi dapat diartikan sebagai orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana intervensi. Adapun sistem partisipan dalam program “pentingnya Bank Sampah dan pelatihan tata kelola bank sampah” ialah sebagai berikut :

a) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. dalam hal ini pekerja sosial merupakan sistem inisiator.

b) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan.

Dalam hal ini ialah pekerja sosial, pengurus gober, lpm bagian lingkungan pegawai Kelurahan Kebon Kangkung

c) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ialah Ketua RW atau pengurus dan perwakilan warga disetiap RW

d) Sistem Pendukung

Sistem pendukung ialah individu yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Dalam hal ini ialah rekan sesama warga di masing masing RW ataupun diluar RW.

e) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan individu yang memiliki otoritas foral atau kekuasaan untuk menerima ataupun menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini ialah Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

6) Sistem Pelaksana

Sistem Pelaksana merupakan individu yang memiliki tugas rutin dalam melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini ialah Gober, Ketua/Pengurus RW Kelurahan Kebon Kangkung dan Pemerintah.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran ialah individu, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat sesuai yang diharapkan. Sistem sasaran dalam hal ini ialah Ketua RW dan masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini ialah pekerja sosial, lpm, gober dan Pemerintah Kelurahan KebonKangkung

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan Penyuluhan sosial mengenai pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan

saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. Teknik ini diterapkan untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan “Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah” yakni untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

2) Teknik Informasi

Teknik informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain. Teknik ini berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada sasaran yakni Ketua RW/ pengurus serta perwakilan warga masing masing RW Kelurahan Kebon Kangkung

3) Teknik Motivasi

Teknik motivasi merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Teknik ini bertujuan untuk mendorong Ketua RW/ pengurus RW atau masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi dalam berpartisipasi dalam menjadi pengurus atau pengelola bank sampah

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan program “Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah” adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16.Rencana Anggaran Penataan Lingkungan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	150.000	150.000
	Surat Undangan	60	Lembar	500	30.000
	Banner sosialisasi	1	Lembar	50.000	50.000
	Jumlah I				230.000
2.	Transportasi				
	Tamu undangan	60	Orang	50.000	3.000.000
	Panitia	8	Orang	50.000	400.000

	Jumlah II				3.400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	55	Box	5000	275.000
	Snack panitia	8	Box	5000	40.000
	Snack tamu undangan	5	Box	10.000	50.000
	Makan siang peserta	55	Box	20.000	1.100.000
	Makan siang panitia	8	Box	20.000	160.000
	Makan siang tamu undangan	5	Box	20.000	100.000

	Jumlah III	1.360.000
	Jumlah Keseluruhan	4.990.000

Tempat pelaksanaan program gedung STT Mandala dalam pertemuan. Selanjutnya, untuk alat yang akan digunakan dalam program ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Tabel Alat Pelaksanaan Penataan Lingkungan Sosial

No	Alat	Jumlah
1.	<i>Sound System</i>	4
2.	Mikrofon	3
3.	LCD Proyektor	4
4.	Kursi	420
5.	Meja	5
6.	Laptop	2

g. Analisis Kelayakan Program

Hasil analisis kelayakan dari program sosialisasi tentang pentingnya bank sampah dan tata kelola bank sampah di Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

Tabel 2.18 Analisis Kelayakan Program Penataan Lingkungan Sosial

Faktor Internal	Peluang (<i>Oppurtunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari masyarakat • Lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung menjadi sehat, rapi dan bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang rendah dalam menjaga lingkungan.
Faktor Eksternal		
Kekuatan (<i>Strang</i>)	Strategi	Strategi ST
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki aturan dalam menjalankan program bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia bersama, gober, LPM, dan Pemerintah bersinergi agar masyarakat memiliki kesadaran dalam upaya pengelolaan sampah sebagai bentuk menjaga lingkungan yang sehat, rapi, bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman tentang tujuan bank sampah • Memberikan pelatihan tentang cara kelola bank sampah
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi WO	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi mengenai pentingnya bank sampah, tujuan dan manfaatnya mudah di pahami 	<ul style="list-style-type: none"> • Meyakinkan sasaran bahwa program akan berdampak baik bagi lingkungan sekitar mereka

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.19 Jadwal Kegiatan Penataan Lingkungan Sosial

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Sosialisasi Pentingnya Bank Sampah	Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bank sampah serta tata kelola sampah	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing masing rw	Pekerja sosial, Gober, LPM	1 hari	Panitia Pelaksana
Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah	Memberikan pelatihan kepada warga yang bersedia jadi pengurus ataupun pengelola bank sampah di masing masing rw sehingga pada saat ada bank sampah di setiap rw tidak krkurangan lagi sumber daya manusia yang mengurus ataupun mengelola bank sampah tersebut	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing masing rw	Pekerja sosial, Gober, LPM	1 Hari	Panitia Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi	Meninjau perkembangan mengenai pemahaman dan keterampilan Kader, pengurus	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing masing rw	Pekerja sosial, Gober, LPM	1 Hari	Panitia Pelaksa

2) Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam program Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah Kelurahan Kebon sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1) Membentuk Panitia Kegiatan

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan *brain storming* diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

Menyusun Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program Pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

(3) Mempersiapkan Kebutuhan Alat dan Bahan Kegiatan

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

(4) Melakukan *Briefing*

Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

(b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

(1) Sosialisasi Pentingnya Bank Sampah

Dalam hal ini akan dilakukan penyuluhan sosial pentingnya bank sampah dan juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

(2) Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah

Dalam hal ini akan dilakukan kegiatan pelatihan kepada warga yang bersedia jadi pengurus ataupun pengelola bank sampah di masing masing rw sehingga pada saat ada bank sampah di setiap rw tidak krkurangan lagi sumber daya manusia yang mengurus ataupun mengelola bank sampah tersebut

Tabel 2.20 Susunan Acara Program Penataan Lingkungan Sosial

No	Kegiatan	Waktu (WIB)_	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan kegiatan	08.00 - 08.30	30 menit	Panitia
2.	Registrasi peserta	08.30 - 09.00	30 menit	Panitia
3.	Pembukaan	09.00 - 09.15	15 menit	MC
4.	Sambutan	09.15 - 09.45	30 menit	Bapak Lurah
5.	Pembacaan Doa	09.45 - 10.00	15 menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai pentingnya Bank Sampah	10.00 - 11.00	60 menit	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
7.	Sesi tanya jawab	11.00 - 11.30	30 menit	Peserta
8.	ISHOMA	11.30 – 12.00	30 menit	Peserta
9.	Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah	12.00 – 13.00	60 menit	Pengurus atau Pengelola Bank Sampah RW 1 dan RW 3
10.	Sesi Tanya Jawab	13.00 – 13.30	30 menit	Perusahaan (CSR)
11.	Dokumentasi	13.30 – 13.45	15 menit	Panitia
12.	Penutup	13.45 - 14.00	15 menit	MC

(c) Tahap Pengakhiran

Dalam tahapan pengakhiran rangkaian kegiatan, terdapat dua kegiatan yakni tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan

yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

(2) Pelaporan Program

Pelaporan Program Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah di Kelurahan Kebon Kangkung merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni DLH kota Bandung, Guber, LPM yang berada di daerah kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapun indikator keberhasilan Program “Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah” di Kelurahan Kebon ialah sebagai berikut:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung tentang bank sampah
- Tidak menumpuknya sampah pada TPS karena sebelum sampai TPS masyarakat sudah tahu untuk memilah sampah
- lingkungan menjadi Kelurahan Kebon Kangkung sehat, rapi dan bersih

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam pembahasan analisis penanggulangan bencana sosial, praktikan memilih permasalahan terkait masih terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung serta warga diluar daerah Kelurahan Kebon Kangkung kecamatan kiaracondong, kota Bandung . Dalam penyusunan laporan praktikum pada profil analisis penanggulangan bencana, praktikan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni wawancara yang dilakukan kepada informan/partisipan yang terpilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai masalah penelitian

Pada tahap asesmen praktikan menggunakan 5W+1H dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu atau masalah penggalangan bencana yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, kecamatan kiaracondong, kota Bandung. Adapun tahapan yang dilakukan oleh praktikan ialah sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data atau pedoman wawancara untuk menggali data dan informasi tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumberdaya yang relevan dengan profil penataan lingkungan sosial.
- 2) Mengidentifikasi dan menentukan informan yang akan memberikan informasi mengenai gambaran isu masalah penataan lingkungan sosial. Berdasarkan
- 3) informasi yang diterima dari bapak andika bahwasannya pada satu tahun terakhir ada warga yang berkonflik karena sudah dari dulu ada selisih paham.
- 4) Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023 praktikan juga melakukan wawancara bapak sekretaris RW 11 bahwasannya yang berkonflik adalah RW 2 dan RW satu selain itu juga biasanya ada berkonflik antara warga Kelurahan Kebon Kangkung dengan warga di luar Kebon Kangkung karena mabok yang mengakibatkan luka pada korban.
- 5) Handoko sebagai warga RW 2 membenarkan bahwasannya masih sering terjadi bentrok antar warga karena adanya rasa lebih unggul dan kurangnya sikap menghargai serta mengormati perbedaan.

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Indonesia merupakan negara terluas ke 15 sekaligus negara kepulauan terbesar di Dunia 1.904.570 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 274.790.244 jiwa pada tahun 2022, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 238,875,159 jiwa atau sekitar 86,9%. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia.

Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 12.899 jumlah penduduk. Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 11 RW yang mana latar belakang baik agama, ras, suku, pekerjaannya juga berbeda-beda. Hal ini yang sering kali mengakibatkan kesalahpahaman ataupun terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung ataupun warga diluar daerah Kelurahan Kebon Kangkung

2.5.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik antara individu di dalam keluarga hingga konflik antara kelompok etnis atau antar negara.

Konflik sosial antara individu bisa berupa perselisihan keluarga, sementara konflik sosial antara kelompok bisa berupa persaingan ekonomi atau konflik agama. Konflik sosial juga dapat disebabkan oleh ketidakadilan sosial, perbedaan kelas, atau ketidakseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang terlibat.

Konflik sosial yang berlangsung dalam waktu tertentu dapat menyebabkan dampak yang cukup luas. Selain menimbulkan situasi yang tidak aman, konflik sosial juga bisa mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Dijelaskan dalam buku *Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Sosial* oleh Tim Ganesha Operation, berikut sejumlah penyebabnya.

a) Perbedaan Antarindividu atau Kelompok

Konflik sosial dapat terjadi ketika antarindividu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Sebagai contoh, perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan yang sama atau perbedaan pendapat tentang kebijakan publik.

b) Perbedaan Kebudayaan di Masyarakat

Penyebab konflik sosial selanjutnya karena ada dua kelompok memiliki perbedaan budaya yang signifikan dan saling bertentangan satu sama lain. Misalnya, perbedaan agama atau adat istiadat yang mengakibatkan konflik.

c) Adanya Perbedaan Kepentingan

Konflik sosial juga bisa terjadi karena terdapat nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan di dalam masyarakat. Contohnya, perbedaan pandangan tentang hak-hak individu, kebebasan, agama, dan sebagainya.

d) Terjadinya Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan salah satu faktor umum terjadinya konflik sosial di masyarakat. Hal ini karena kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan terjadi di antara kelompok tertentu. Misal, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan kesempatan kerja.

e) Adanya Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain juga dapat menyebabkan konflik sosial masyarakat. Contoh, konflik yang terjadi akibat adanya tindakan kekerasan atau penindasan dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah.

3) Dampak Konflik Sosial

Konflik sosial dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dikutip dari buku Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat oleh Janu Murdiyatomoko, berikut dampak dari konflik sosial.

- Retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih.
- Menimbulkan aksi kekerasan, kerusakan, dan penghancuran infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum.
- Merusak kegiatan ekonomi, mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa, serta menurunkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Menyebabkan trauma dan kecemasan pada individu yang terlibat atau terkena dampaknya, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan.
- Dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan kerugian kemanusiaan yang besar pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

4) Bentuk-bentuk Konflik Sosial

Menurut buku Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Tim Ganesha Operation, konflik dibedakan berdasarkan sifat dan posisi pelaku yang berkonflik. Untuk lebih jelasnya, simak bentuk-bentuk konflik sosial di bawah ini.

Berdasarkan Sifat

Bentuk konflik sosial berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

- **Konflik Destruktif**
Konflik destruktif adalah konflik yang membawa akibat kurang menguntungkan bagi pihak yang berkonflik, yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda, serta timbulnya persaingan, cemas, tegang, dan sebagainya.
- **Konflik Konstruktif**
Konflik konstruktif adalah suatu konflik yang mampu membawa ke arah keuntungan yang membangun

Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

- **Konflik Vertikal**
Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berbeda.
- **Konflik Horizontal**
Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di dalam kelompok sosial yang sama.
- **Konflik Diagonal**
Konflik diagonal ialah konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan pertentangan dari masyarakat.

5) Berikut upaya mengatasi konflik di masyarakat:

- **Preventif**
Upaya preventif adalah upaya pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan baik secara pribadi maupun berkelompok. Tindakan preventif dilakukan karena manusia menyadari adanya potensi terjadi konflik apabila tidak diantisipasi.
Tujuan dari upaya mengatasi konflik secara preventif adalah mengondisikan keadaan sedemikian rupa. Sehingga dapat mencegah timbulnya masalah antara kedua belah pihak.
- **Represif**
Upaya represif adalah upaya penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Represif kerap dilakukan untuk menindak pelanggaran. Upaya represif biasanya dilakukan oleh individu, kelompok, atau Pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Tujuannya adalah mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan yang ada.
Tindakan represif dapat digolongkan ke dalam beberapa tindakan, yaitu:
Tindakan Pribadi Represif: Pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu yang menjadi panutan.
Tindakan Institusional Represif: Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tidak hanya mengawasi para anggota lembaga saja, tetapi juga mengawasi kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut.
Tindakan Resmi: Pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang mengikat.

Tindakan Tidak Resmi: Pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas

- Kuratif

Upaya mengatasi konflik secara kuratif adalah dengan menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi.

Sehingga, upaya kuratif merupakan tindak lanjut dalam masalah atau konflik yang sedang berlangsung.

Berikut langkah-langkah mengatasi konflik secara kuratif yang dapat dilakukan: Mencari penyebab terjadinya konflik.

Mencari solusi yang bersifat win-win solution atau menguntungkan kedua belah pihak.

Melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator.

Menempuh jalur hukum atau pengadilan sebagai upaya terakhir apabila konflik tidak bisa diatasi secara damai.

2.5.3 Asesmen

Dalam penyusunan asesmen, praktikan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan teknik penelitian yang digunakan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan penelaahan dokumen. Selanjutnya, digunakan data survei ataupun data statistik sebagai pelengkap data yang nantinya dapat dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

a) Identifikasi Masalah

Indonesia merupakan negara terluas ke 15 sekaligus negara kepulauan terbesar di Dunia 1.904.570 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 274.790.244 jiwa pada tahun 2022, erta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 238,875,159 jiwa atau sekitar 86,9%. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan

wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia.

Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 12.899 jumlah penduduk. Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 11 RW yang mana latar belakang baik agama, ras, suku, pekerjaannya juga berbeda-beda. Hal ini yang sering kali mengakibatkan kesalahpahaman ataupun terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung ataupun warga diluar daerah Kelurahan Kebon Kangkung. Bapak andika selaku staf Kelurahan Kebon Kangkung mengatakan warga yang berkonflik karena sudah dari dulu ada selisih paham.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023 praktikan juga melakukan wawancara bapak sekretaris RW 11 bahwasannya yang berkonflik adalah RW 2 dan RW satu selain itu juga biasanya ada berkonflik antara warga Kelurahan Kebon Kangkung dengan warga di luar Kebon Kangkung karena mabok yang mengakibatkan luka pada korban.

Handoko sebagai warga RW 2 membenarkan bahwasannya masih sering terjadi bentrok antar warga karena adanya rasa lebih unggul dan kurangnya sikap menghargai serta mengormati perbedaan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh beberapa informan, dapat diketahui bahwa masih terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung serta dengan warga diluar daerah Kebon Kangkung dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- a. Adanya rasa lebih unggul dari pada warga yang lain.
- b. Kurangnya keamanan
- c. Kurangnya sikap menghargai dan menghormati dalam perbedaan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan tersebut, praktikan selanjutnya melakukan analisa permasalahan menggunakan analisis pohon masalah untuk mengetahui sebab akibat dari permasalahan tersebut, berikut analisis sebab akibat permasalahan menggunakan pohon masalah :



Gambar 2.5 Pohon Analisis Masalah Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil analisis sebab akibat menggunakan pohon masalah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat dari masih terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung serta dengan warga diluar daerah Kelurahan Kebon Kangkung ialah sebagai berikut.

1. Penyebab Masalah

Berdasarkan analisi sebab akibat menggunakan pohon masalah, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sebab permasalahan, yakni :

- (a) Adanya rasa lebih unggul dari pada warga yang lain.
- (b) Kurangnya keamanan lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung
- (c) Kurangnya sikap menghargai dan menghormati dalam perbedaan.

2. Dampak Masalah

Dari gambaran pohon masalah tersebut, ditemukan 4 (tiga) dampak permasalahan, yakni :

- (a) Salah paham bisa terjadi lagi nantinya
- (b) Merugikan beberapa pihak
- (c) Tidak adanya sikap menghargai dan menghormati dalam perbedaan
- (d) lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung menjadi tidak aman

3. Fokus Masalah/Masalah inti/Masalah utama

Dari analisis pohon masalah telah tergambar permasalahan utama ialah masih terjadi konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung serta dengan warga diluar dari Kelurahan Kebon Kangkung

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah yang ada, dapat ditemukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan ialah sebagai berikut :

1) Sosialisasi upaya preventif dan kuratif

Dalam hal ini akan dilakukan penyuluhan sosial terkait dengan pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang bagi masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung dan mengatasi konflik secara kuratif adalah dengan menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung.

2) Peningkatan keamanan lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung

Kebutuhan akan keamanan menjadi hal penting karena jika tidak ada keamana yang dilakukan hal ini bisa berdampak semakin besar ataupun semakin luasnya konflik yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yakni berupa dukungan emosional, afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Dalam hal ini sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ialah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi ataupun asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan kepada anggotanya. Dalam hal ini sistem sumber formal yang dimanfaatkan ialah BHABINKAMTIBMAS dan Kantor Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik dari lembaga-lembaga Pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

(a) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Merupakan lembaga yang bertempat di Kelurahan Kebon Kangkung yang tentunya dapat memberikan arahan tentang bagaimana peran dalam kehidupan bermasyarakat serta upaya mencegah dan menanggulangi konflik

(b) Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)

Menjadi unit paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu memberikan edukasi terkait atuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlitmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas/Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lainsatu

(c) Karang taruna

Merupakan organisasi pemuda yang untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Karang taruna diharapkan mejadi wadah serta menjembatani pemuda dalam berkreatifitas, berkreasi, bersosialisasi yang diharapkan pemuda bisa lebih baik dari sebelumnya karena salah satu tugas dari karang taruna Menumbuhkan

semangat kebersamaan, sosialisasi yang kuat antara satu warga dengan warga yang lain.

2.5.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terluas ke 15 sekaligus negara kepulauan terbesar di Dunia 1.904.570 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 274.790.244 jiwa pada tahun 2022, erta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 238,875,159 jiwa atau sekitar 86,9%. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia.

Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 12.899 jumlah penduduk. Kelurahan Kebon Kangkung memiliki 11 RW yang mana latar belakang baik agama, ras, suku, pekerjaannya juga berbeda beda. Hal ini yang sering kali mengakibatkan kesalahpahaman ataupun terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung ataupun warga diluar daerah Kelurahan Kebon Kangkung

Bapak andika selaku staf Kelurahan Kebon Kangkung mengatakan warga yang berkonflik karena sudah dari dulu ada selisih paham.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023 praktikan juga melakukan wawancara bapak sekretaris RW 11 bahwasannya yang berkonflik adalah RW 2 dan RW satu selain itu juga biasanya ada berkonflik antara warga Kelurahan Kebon Kangkung dengan warga di luar Kebon Kangkung karena mabok yang mengakibatkan luka pada korban.

Handoko sebagai warga RW 2 membenarkan bahwasannya masih sering terjadi bentrok antar warga karena adanya rasa lebih unggul dan kurangnya sikap menghargai serta mengormati perbedaan.

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum

Tujuan umum pelaksanaan program sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan program sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung ialah :

- (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung.
- (b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara menanggulangi jika nantinya akan ada lagi konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung dan konflik diluar warga Kelurahan Kebon Kangkung
- (c) Menciptakan lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung yang aman dan nyaman.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada upaya agar tidak terjadi lagi konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung maupun konflik dengan warga diluar Kelurahan Kebon Kangkung yakni melalui “preventif dan kuratif dalam mencegah serta menanggulangi masalah dalam masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung” yang didalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan sosial terkait upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat.
Penyuluhan sosial merupakan proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan akan diberitahukan informasi mengenai upaya dalam mencegah serta menanggulangi masalah jika terjadi konflik
- 2) Kegiatan menyampaikan aspirasi tentang peningkatan keamanan di Kelurahan Kebon Kangkung
Sebagai wadah aspirasi jika keamanan di Kelurahan Kebon Kangkung perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hal hal yang diinginkan serta melindungi warga dari konflik yang ada

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam rencana intervensi dapat diartikan sebagai orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam perubahan dan memiliki peran

penting dalam menunjang keberhasilan rencana intervensi. Adapun sistem partisipan dalam program penyuluhan sosial mengenai program sosialisasi upaya preventif dan kuratif mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat” sebagai berikut :

1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. dalam hal ini pekerja sosial merupakan sistem inisiator.

2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Dalam hal ini ialah pekerja sosial, pengurus gober, lpm, linmas karang taruna, bhabinkamtibmas Kelurahan Kebon Kangkung bagian lingkungan pegawai Kelurahan Kebon Kangkung

3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ialah Ketua RW atau pengurus dan perWakilan warga disetiap RW

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung ialah individu yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Dalam hal ini ialah rekan sesama warga di masing masing RW ataupun diluar RW.

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan individu yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima ataupun menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini ialah Pemerintah keluraha Kebon Kangkung

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan individu yang memiliki tugas rutin dalam melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini ialah bhabinkamtibmas, linmas, lpm, karang taruna Ketua/Pengurus RW Kelurahan Kebon Kangkungn dan Pemerintah.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran ialah individu, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat sesuai yang diharapkan. Sistem sasaran dalam hal ini ialah Ketua RW dan perWakilan warga setiap RW Kelurahan Kebon Kangkung

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini ialah pekerja sosial, lpm, linmas karang taruna dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan Penyuluhan sosial mengenai upaya preventif dan kuratif dalam mencegah serta menanggulangi masalah dalam masyarakat yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

1) Teknik komunikasi

merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan. Teknik ini diterapkan untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

2) Teknik Informasi

Teknik informasi merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau informasi yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain. Teknik ini berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada sasaran yakni Ketua RW/ pengurus serta perwakilan warga masing masing RW Kelurahan Kebon Kangkung

3) Teknik Motivasi

Teknik motivasi merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Teknik ini bertujuan untuk mendorong Ketua RW/ pegurus RW atau masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan pencegahan serta menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan program “Sosialisasi Upaya Preventif dan Kuratif Mencegah dan Menganggulangi Masalah dalam Masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung” adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21 Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	150.000	150.000

	Surat Undangan	60	Lembar	500	30.000
	Banner sosialisasi	1	Lembar	50.000	50.000
	Jumlah I				230.000
2.	Transportasi				
	Tamu undangan	60	Orang	50.000	3.000.000
	Panitia	8	Orang	50.000	400.000
	Jumlah II				3.400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	55	Box	5000	275.000
	Snack panitia	8	Box	5000	40.000
	Snack tamu undangan	5	Box	10.000	50.000
	Makan siang peserta	55	Box	20.000	1.100.000
	Makan siang panitia	8	Box	20.000	160.000
	Makan siang tamu undangan	5	Box	20.000	100.000
	Jumlah III				1.360.000
	Jumlah Keseluruhan				4.990.000

Tempat pelaksanaan program gedung STT Mandala dalam pertemuan. Selanjutnya, untuk alat yang akan digunakan dalam program ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Tabel Alat Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

No	Alat	Jumlah
1.	<i>Sound System</i>	4
2.	Mikrofon	3
3.	LCD Proyektor	4
4.	Kursi	420
5.	Meja	5
6.	Laptop	2

g. Analisis Kelayakan Program

Hasil analisis kelayakan dari program sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menganggulangi masalah dalam masyarakat di Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

Tabel 2.23 Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana

Faktor Internal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari masyarakat • Lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung menjadi aman, tentram, nyaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang rendah dalam menghormati dan menghargai perbedaan
Faktor Eksternal		
Kekuatan (Strength)	Strategi	Strategi ST
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki aturan tentang sumber sistem sumber yang banyak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia bersama, lpm linmas bhabinkamtibmas, karang taruna dan Pemerintah bersinergi agar masyarakat memiliki motivasi dalam upaya mencegah serta menanggulangi konflik yang ada • Adanya kerja sama tersebut memudahkan dalam mencapai tujuan upaya preventif dan kuratif 	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan pemahaman, tentang tujuan dan manfaat dari upaya preventif dan kuratif dalam menanggulangi permasalahan dalam masyarakat • memberikan pelatihan tentang bagaimana cara tata kelola bank sampah
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO	Strategi WT

<ul style="list-style-type: none"> • masih banyaknya masyarakat yang individualis tidak ada keterbukaan antar warga dan ketegasan dari pihak yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi mengenai upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menganggulangi masalah dalam masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung serta tujuan dan manfaatnya yang mudah dipahami 	<ul style="list-style-type: none"> • Meyakinkan sasaran bahwa program akan berdampak baik bagi lingkungan sekitar mereka
--	--	---

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.24 Jadwal Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menganggulangi masalah dalam masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung	upaya dalam mencegah dan menanggulangi masalah jika terjadi konflik	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing-masing rw	Pekerja sosial, Ipm linmas, Karang taruna, bhabinkamtibmas	1 hari	Panitia Pelaksana
wadah aspirasi jika keamanan di Kelurahan Kebon Kangkung perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hal hal yang diinginkan serta melindungi warga dari konflik yang ada	Kegiatan menyampaikan aspirasi tentang peningkatan keamanan di Kelurahan Kebon Kangkung	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing-masing rw	Pekerja sosial, Ipm linmas, Karang taruna, bhabinkamtibmas	1 Hari	Panitia Pelaksana

Monitoring dan Evaluasi	Meninjau perkembangan mengenai pemahaman dan keterampilan Dalam upaya mencegah dan menanggulangi permasalahan dalam masyarakat	Ketua RW/Pengurus dan perwakilan warga masing masing rw	Pekerja sosial, Ipm linmas, Karang taruna, bhabinkamtibmas	1 Hari	Panitia Pelaksana
-------------------------	--	---	--	--------	-------------------

2. Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam program sosialisasi upaya preventif dan kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat di Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan program kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1) Membentuk Panitia Kegiatan

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brain storming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

Menyusun Proposal Kegiatan

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program Pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

(3) Mempersiapkan Kebutuhan Alat dan Bahan Kegiatan

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

(4) Melakukan *Briefing*

Kegiatan ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

(b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program Pentingnya Bank Sampah dan Pelatihan Tata Kelola Bank Sampah Kelurahan Kebon Kangkung sebagai berikut:

1) Sosialisasi upaya preventif dan kuratif

Dalam hal ini akan dilakukan penyuluhan sosial terkait dengan pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang bagi masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung dan mengatasi konflik secara kuratif adalah dengan menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung

2) Pelatihan keamanan lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung

Dalam hal ini kebutuhan akan keamanan menjadi hal penting karena jika tidak ada keamanan yang dilakukan hal ini bisa berdampak semakin besar ataupun semakin luasnya konflik yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung.

Tabel 2.25 Susunan Acara Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan	Waktu (WIB)	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan kegiatan	08.00 - 08.30	30 menit	Panitia
2.	Registrasi peserta	08.30 - 09.00	30 menit	Panitia
3.	Pembukaan	09.00 - 09.15	15 menit	MC
4.	Sambutan	09.15 - 09.45	30 menit	Bapak Lurah
5.	Pembacaan Doa	09.45 - 10.00	15 menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai Upaya Preventif dan Kuratif dalam mencegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat	10.00 - 11.00	60 menit	Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebon Kangkung
7.	Sesi tanya jawab	11.00 - 11.30	30 menit	Peserta
8.	ISHOMA	11.30 - 12.00	30 menit	Peserta
9.	Peningkatan keamanan Kelurahan Kebon Kangkung	12.00 - 13.00	60 menit	Lurah Kebon Kangkung
10.	Sesi Tanya Jawab	13.00 - 13.30	30 menit	Peserta
11.	Dokumentasi	13.30 - 13.45	15 menit	Panitia
12.	Penutup	13.45 - 14.00	15 menit	MC

(c) Tahap Pengakhiran

Dalam tahapan pengakhiran rangkaian kegiatan, terdapat dua kegiatan yakni tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan.

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

2. Pelaporan Program

Pelaporan Program sosialisasi upaya preventi dan kuratif dalam mecegah dan menanggulangi masalah dalam masyarakat merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban

secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni bhabinkamtibmas dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung kota bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapaun indikator keberhasilan Program mengenai sosialisasi pentingnya bank sampah dan pelatihan tata kelola bank sampahi alah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara menanggulangi jika nantinya akan ada lagi konflik anatar warga Kelurahan Kebon Kangkung dan konflik diluar warga Kelurahan Kebon Kangkung
- terciptanya lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung yang aman dan nyaman

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk membentuk mahasiswa agar sesuai dengan profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dilakukan luring. Praktikan diminta untuk menganalisis isu terkait profil lulusan dengan menggunakan data primer. Berikut hasil analisis praktikan terhadap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

- a. Analisis Jaminan Sosial Dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan memilih fokus masalah peserta BPJS Kesehatan di Kelurahan Kebon Kangkung mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran.
- b. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan memilih fokus masalah belum meratanya bantuan yang diberikan oleh Perusahaan (CSR) kepada Posyandu yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung
- c. Analisis Pemberdayaan Sosial Dalam profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan memilih fokus masalah belum optimalnya PKK dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi dari PKK
- d. Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih fokus masalah belum meratanya bank sampah di setiap RW Kelurahan Kebon Kangkung
- e. Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan memilih fokus masalah masih terjadinya konflik antar warga Kelurahan Kebon Kangkung serta dengan warga diluar dari Kelurahan Kebon Kangkung

3.2 Rekomendasi

Mengacu pada hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan Praktikum Laboratorium. Rekomendasi tersebut dalam upaya peningkatan dan perbaikan pelaksanaan Praktikum Laboratorium yang meliputi rekomendasi bagi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial.

- a. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1) Mempersiapkan sistematika Laporan Praktikum Laboratorium untuk lebih matang dan detail lagi.
 - 2) Menyamakan persepsi antar dosen pembimbing agar setiap mahasiswa praktikan mendapatkan arahan yang jelas dan sama.
 - 3) Menetapkan sistematika penulisan laporan profil Praktikum Laboratorium dan laporan akhir Praktikum Laboratorium sebelum pelaksanaan Praktikum Laboratorium.

- 4) Untuk mengefesienkan waktu pembuatan Laporan Praktikum langsung menggunakan satu laporan saja yang berisi kumpulan dari 5 profil, sehingga tidak perlu membuat laporan profil yang cukup memakan waktu.
- b. Politeknik Kesejahteraan Sosial Praktikum Laboratorium yang bersifat luring ini merupakan kegiatan praktikum yang pertama kali diselenggarakan, sehingga merupakan pengalaman baru untuk mahasiswa dan dosen, maka dari itu butuh adaptasi yang cukup untuk peningkatan kualitas setiap mahasiswa dan dosen selama Praktikum Laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandungkab.go.id. Dokumen PKK
[https://www.kelurahansulaiman.bandungkab.go.id/desa/upload/dokumen/PKK-\(1\).pdf](https://www.kelurahansulaiman.bandungkab.go.id/desa/upload/dokumen/PKK-(1).pdf) Diakses pada 23 April
- BPJS Ketenagakerjaan 2023. Perusahaan di Jawa Barat Jumlah
<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berdasarkan-perusahaan-di-jawa-barat>
Diakses pada 26 Februari 2023
- BPJS Kesehatan 2014. Peserta Penerima Upah
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13>
Diakses pada 26 Februari 2023
- Detik.com Mengenal Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Contohnya
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6580342/mengenal-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-contohnya>
- Kemkes.go.id. pengertian CSR <https://promkes.kemkes.go.id/csr/pengertian-csr>
Diakses Pada 7 April 2023
- Kemenpppa.go.id. 2021 Ajak Seluruh Pihak Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3341/kemen-pppa-ajak-seluruh-pihak-berkomitmen-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-keluarga>
- Kompas.com 2022. Upaya Mengatasi Konflik di Masyarakat
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/02000001/upaya-mengatasi-konflik-di-masyarakat>. Diakses pada 12 April 2023
- Kompas.com upaya mengatasi konflik di masyarakat
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/09/02000001/upaya-mengatasi-konflik-di-masyarakat> Diakses Pada 9 April 2023
- Perpustakaan Poltekkes Malang BAB II KTI
http://perpustakaan.poltekkesmalang.ac.id/assets/file/kti/1603000106/7._BAB_II_.pdf Diakses pada 9 Maret 2023
- Simba.menlhk.go.id Sistem Manajemen BANK Sampah
<https://simba.menlhk.go.id/portal/#:~:text=Bank%20Sampah%20adalah%20fasilitas%20untuk,Peraturan%20Menteri%20LH%20No.%2014> Diakses pada 17 April 2023

Turmudi, Endang. 2021. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tipologi Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung
Periode Januari 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Praktikum



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan
Praktikum Laboratorium**

**Yth. Lurah Kebon Kangkung
Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung
Jawa Barat
Di
Bandung**

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi,.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertiinggal.

Lampiran

Nomor : 0141 /7.1.8/DL.02.01/01/2023

Tanggal : 13 Januari 2023

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PRAKTIKUM LABORATORIUM
DI KELURAHAN KEBON KANGKUNG KECAMATAN KIARAONDONG
KOTA BANDUNG JAWA BARAT**

NO.	NAMA MAHASISWA	NRP	DOSEN PEMBIMBING
1	Ahmad Haikal Riyadhi	2003004	Drs. Suradi, M.Si
2	Adisa Fatimah Az-Zahra	2003044	
3	Azizah Nisa Azzahrah	2003047	
4	Adinda Ratna Noviyanti	2003068	
5	Yohandi Fahrul Fauji	2003101	
6	Dimas Suharsono	2003011	
7	Andini Larasati	2003064	
8	St. Ainun Jariah	2003075	



Lampiran 2 : Dokumentasi Pembekalan Praktikum Laboratorium

Pembekalan Analisis Jaminan Sosial oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME



Pembekalan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Bapak Tonton Heriyanto



Pembekalan Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maarif



Pembekalan Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Bapak Ade Reno, AKS, MSW



Pembekalan Analisis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Mohd Robi Amr



Lampiran 3: Dokumentasi Pembimbingan Praktikum Laboratorium



Lampiran 4: Dokumentasi Asesmen Lapangan Praktikum Laboratorium





Lampiran 5: Dokumentasi Kegiatan di Kelurahan



Lampiran 6 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang Praktikum Laboratorium



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Fax. 022-2502982, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
 PROGRAM SARJANA TERAPAN**

**BERITA ACARA
 PELAKSANAAN UJIAN LISAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pada hari ini, Selasa Tanggal 2 Mei 2023, telah dilakukan Ujian Lisan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung Tahun Akademik 2022/2023 di ruang : C. 2.3

Nama : Asilah Nisa Anandita
 NRP : 20.06.047
 Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya :

NO	NAMA PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Suradi, M.Si	
2.	Milly Mildawati, Ph.D	

Bandung, Mei 2023

Mengetahui
 Ketua Prodi Perlindungan dan
 Pemberdayaan Sosial

Ketua Sidang

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D
 NIP. 19640328 199003 2 003

Suradi
 NIP.

